

SKRIPSI

Filsafat Politik Machiavelli dalam Perspektif Konsep Negara Utama Al-Farabi

Disusun oleh :

Nama : Windy Dwi Aprilia

NIM : 16.5.1.211.015

Pembimbing:

Dr. Otong Sulaiman

Skripsi ini ditujukan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana

Prodi Akidah dan Filsafat Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra
Jakarta

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama : Windy Dwi Aprilia

NIM : 16.5.1.211.015

Judul : **Filsafat Politik Machiavelli dalam Perspektif Konsep Negara Utama Al-Farabi**

Telah disetujui oleh pembimbing untuk disidangkan pada Sidang Skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 September 2022

Pembimbing



Dr. Otong Sulaeman, M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Laporan sidang skripsi:

Nama : Windy Dwi Aprilia

NIM : 16.5.1.211.015

Judul : **Filsafat Politik Machiavelli dalam Perspektif Konsep Negara Utama Al-Farabi**

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:


Dr. Khalid Al-Walid

(Ketua Sidang)

Date _____(.....)

Umar Syahab


(Penguji I)

Date 09/November/2023 ()

Dr Otong Sulaeman, M.Hum

(Penguji II/ Pembimbing)

31 Agustus 2023

()

Dr Basrir Hamdani Ph.D

(Penguji III)

_____ (.....)

Ir. Ahmad Jubaeli

(Sekretaris Sidang)

Date _____(.....)

Filsafat Politik Machiavelli dalam Perspektif Konsep Negara Utama Al-Farabi

Disusun oleh:

Windy Dwi Aprilia

NIM:

16.5.1.211.015

Pembimbing:

Dr. Otong Sulaiman

SKRIPSI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan kerja asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta, 5 September 2022

Windy Dwi Aprilia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = َ;	i = ِ	u = ُ
Panjang	: ā = َ;	ī = ِ;	ū = ُ
Diftong	: ay = َ;	aw = َ	

C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله في *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقليّة ditulis 'aqliyyah, فعليّة ditulis *fi'liyyah*, dan قوّة ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti عدوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis 'aduw.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis 'Abdurrahmān dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, khususnya telah memberi nikmat kekuatan kepada penulis dalam menyusun penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap untuk Baginda Rasul Muhammad saw, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga untuk kita selaku umatnya.

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait penyusunan proposal penelitian ini. Mereka itu adalah sebagai berikut:

1. Dr. Kholid Al-Walid yang telah memberikan materi filsafat yang begitu berharga, serta menyediakan fasilitas untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Dr. Otong Sulaiman selaku pembimbing penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa mendapat gelar sarjana
3. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam doa-doa yang dipanjatkan untuk penulis agar diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dan mendapat gelar sarjana
4. Kepada BTS khususnya Kim Soekjin atas lagu-lagunya yang memberi semangat kepada penulis untuk melanjutkan penulisan ini.
5. Kepada rekan-rekan yang telah membantu penulis baik referensi, terjemah kitab maupun memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis

Windy Dwi Aprilia

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Filsafat Politik Machiavelli dalam Perspektif Konsep Negara Utama Al-Farabi”. Melalui penelitian ini, penulis membahas pemikiran filsafat politik Machiavelli dalam perspektif konsep negara utama sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Farabi dalam karyanya yang berjudul *Ara` Ahl al-Madinah al-Fadhilah*. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa teori kekuasaan dan filsafat politik Machiavelli memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan konsep negara utama Al-Farabi. Persamaannya adalah dalam melihat negara, baik machiavelli maupun Al-Farabi menyatakan bahwa negara bukan milik personal melainkan impersonal. Negara bukan hal yang melekat pada diri seseorang, sehingga entitas negara sudah menjadi entitas publik, dimiliki secara bersama-sama. Adapun perbedaannya ada pada tujuan dan prinsip-prinsip moral dari bangunan sebuah negara. Machiavelli menyatakan bahwa tujuan dari segala langkah politik adalah demi mencapai kekuasaan, sedangkan Al-Farabi menyatakan bahwa tujuan pembentukan sebuah negara adalah dalam rangka melindungi seluruh rakyat yang dipimpin. Selain itu, terkait dengan moralitas, Machiavelli menekankan pemisahan moral dan kekuasaan, sehingga pemimpin dapat menghalalkan segala cara baik atau buruk demi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Sedangkan menurut Al-Farabi, pemimpin ideal haruslah memiliki dua kriteria utama, yaitu berpengetahuan (teoritis) dan bermoral (praktis). Berpengetahuan bermakna bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang luas sehingga ia mampu untuk memberikan solusi bagi permasalahan di suatu negara dan mampu untuk membimbing rakyatnya. Selain itu, pemimpin juga haruslah bermoral agar seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan dalam prakteknya seorang pemimpin tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji yang merupakan tindakan tidak bermoral.

Kata Kunci : Filsafat Politik, Machiavelli, Al-Farabi, Moralitas, Tujuan Pembentukan Negara

DAFTAR ISI

COVER.....	
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan.....	9
F. Manfaat.....	9
G. Kajian Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Metode Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Data dan Sumber Data	15
I. Teknik Pengumpulan Data	17

BAB II

Pemikiran Filsafat Politik Machiavelli	19
A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pemikiran	19
B. Filsafat Politik Machiavelli	24

C. Konsep moral dan kekuasaan	33
1. Etika dan moral	33
2. Kekuasaan	41
BAB III	
PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK AL-FARABI	44
A. Riwayat Hidup dan Latar belakang pemikiran	44
B. Filasafat Politik Al-Farabi	51
C. Pemimpin Negara Utama Al-Farabi	60
BAB IV	
RELEVANSI PEMIMPIN IDEAL AL-FARABI ATAS TEORI	
KUASA MACHIAVELLI.....	73
A. Teori Kuasa Machiavelli	73
B. Relevansi Pemimpin Ideal	75
BAB V	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
Daftar Pustaka	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bicara mengenai politik tidak bisa terlepas dari beberapa aspek penting yang terkait dengan otoritas dan kekuasaan. Kekuasaan dapat dikatakan salah satu unsur penting dalam sistem perpolitikan suatu negara. Hal ini dikarenakan baik atau buruknya sistem yang digunakan untuk berkuasa dapat menentukan kondisi masyarakat dalam suatu negara. Sehingga keberadaan kekuasaan tergantung pada hubungan antara pemimpin dan yang di pimpin (rakyat).¹Sejatinya, kekuasaan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi seorang pemimpin, melainkan kepentingan rakyat. Hal ini dikarenakan di dalam kekuasaan politik tersembunyi moral publik yang tidak bisa dihindari sebagai kepentingan orang banyak atau rakyat.²Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan adalah alat untuk tercapainya tujuan suatu negara. Maka dari itu, isu tentang kekuasaan menjadi perbincangan panjang yang belum menemukan titik terang dan menarik untuk dikaji secara mendalam.

Dalam perjalannya, kekuasaan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Kekuasaan dalam beberapa kasus terlihat sebagai bentuk dominasi penguasa (pemimpin) demi tercapainya keinginan untuk menguasai segala sesuatu yang memberikan keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya. Kemudian menimbulkan anggapan bahwa kekuasaan selalu dipandang negatif. Hal ini dikarenakan banyaknya

¹ Selo Soemardjan, Pola-Pola kepemimpinan Dalam Pemerintahan, ceramah pada Coaching Management Lembaga Pertahanan Nasional, 7 Maret 1967, tidak diterbitkan, dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.288- 289

² Lestiyono santoso, Tinjauan Filsafat Politik tentang relasi Moral dan Kekuasaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, 2017, desertasi, Universitas Gajah Mada.

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam berjalannya kekuasaan, sehingga orang-orang sudah tidak melihat sisi positif dalam kekuasaan itu sendiri.³ Sehingga secara bersamaan, muncul pertanyaan konsep kuasa seperti apa yang dapat di implementasikan dalam membangun negara?.

Sementara moral disisi lain memiliki peran yang cukup besar dalam hubungannya dengan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, moralitas merupakan kondisi yang turut menentukan keadaan, karena moral dianggap sebagai kontrol sosial dan dasar tumbuhnya sebuah kekuasaan.⁴ Manusia pada dasarnya selalu menggunakan nilai dalam setiap berbuatannya, salah satunya nilai moral. Contohnya dalam agama islam manusia dikatakan makhluk moral karena manusia selalu dihadapkan dengan perkara baik dan buruk. Seorang sosiolog asal Inggris juga menyatakan bahwa dalam hubungan antar manusia yang dalam hal ini hubungan antar pemimpin dan rakyat tidak bisa lepas dari etika atau moral, karena dengannya pedoman mengenai baik dan buruk dikembalikan.⁵ Dengan demikian segala aturan yang dibuat oleh pemimpin seharusnya sesuai dengan nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Sehingga hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat terjalin dengan harmonis. Serta aturan yang ada dalam suatu negara berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam sejarahnya, kekuasaan dan moral adalah dua hal yang menyatu dalam konsep kekuasaan dalam beberapa agama. Hal ini dapat dilihat dari konsep kekuasaan agama yahudi, agama katolik dan agama islam. Selain dari segi agama, kekuasaan dan moral juga menyatu sebagai instrument untuk mengatur kehidupan masyarakat terlihat pula dalam kehidupan masyarakat tradisional yang belum

³ Aniek, Rumijati, kekuasaan dan moralitas, sebuah pengantar kearah pemahaman organisasi, jurnal ilmiah bestari, no.32.Th.XIV. 2001. Hal 54.

⁴ Aniek, Rumijati, kekuasaan dan moralitas, sebuah pengantar kearah pemahaman organisasi, jurnal ilmiah bestari, no.32.Th.XIV. 2001. Hal 54.

⁵ David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), Hal 34

banyak tersentuh dengan modernisasi. Di mana aturan yang berlaku pada masyarakat tradisional adalah aturan yang masih memegang nilai moralitas. Pemisahan antara kekuasaan dan moral dimulai dengan sekularisasi atau pemisahan agama dan politik. Kekuasaan sebagai bagian dari politik, sedangkan agama dihubungkan dengan moral. sekularisasi pada awalnya terjadi di negara bagian barat (Kristen) yang dikenal dengan lahirnya “*Renaissance*”. Dirkususus mengenai kekuasaan dan moral juga berkembang di dunia barat. Di era Machiavelli atau *Renaissance* , konsepsi antara kekuasaan dan moral mulai ditolak keberadaannya. Semangat pencerahan yang berasal dari manusia kemudian mulai ingin memerdekakan diri dari belenggu skolastik. Menurut Machiavelli negara atau kekuasaan harus dipisahkan dari moralitas. Kecuali sejauh mana moral memiliki nilai ultitralitas bagi kekuasaan dan negara.⁶ Menurut Machiavelli di dalam politik satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah kekuasaan. Dalam meraih tujuan kekuasaan politik segala cara dapat dilakukan oleh pemimpin, seperti berdusta, tipu, muslihat, sumpah-sumpah palsu, penghianatan, menginjak-injak kebenaran, merampas hak orang lain dan sebagainya. Karena yang terpenting adalah bagaimana meraih tujuan kekuasaan.⁷ Orang yang melakukan segala cara untuk memperoleh kekuasaan, bukanlah orang yang berjuang demi prinsip-prinsip mulia yang sering diobrolkan.⁸

Machavelli menolak gagasan yang menyatakan bahwa kekuasaan sebagai alat untuk mempertahankan nilai moral atau agama. Menurutnya, kekuasaan seharusnya menjadi alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan itu sendiri.⁹ Machiavelli

⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001) Hal 46

⁷ Niccolo Machiaveli, *Sang Penguasa* (Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2002) xxxii

⁸ El-Affendi, Abdel Wahab, *Masyarakat Tak Bernegara: Krtitik Teori Politik Islam*, (Yogyajakarta: LKIS,1994), Hal 13

⁹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001) Hal 133

meyakini bahwa kestabilan dan kekuasaan itu lebih penting dari pada legitimasi moral. Machiavelli menentang arus pemikiran yang berkembang pada masa itu. Machiavelli semacam menganut sinisme moral dalam filsafat politik dengan berani mengemukakan gagasannya bahwa tujuan politik dari seorang penguasa adalah mempertahankan kekuasaan yang ada dalam genggamannya.¹⁰ Dalam bukunya *Il Principe* (Sang Penguasa) Machiavelli menyatakan bahwa seorang pemimpin dapat menggunakan segala cara tanpa melihat baik dan buruk perbuatan tersebut untuk melindungi daerah kekuasaannya. Dengan demikian, seorang penguasa harus jeli dalam melihat situasi yang sedang terjadi di dalam daerah kekuasaannya. Apabila keadaan mendesak maka seorang pemimpin dapat menghalalkan segala cara termasuk melakukan cara keji untuk mempertahankan daerah kekuasaannya.¹¹ Tujuan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, menurut Machiavelli dalam *Dicourse*, semua tujuan pemimpin adalah untuk kebaikan umum (*common good*). Maksudnya, bahwa pemimpin tidak harus membahas apakah tindakannya tersebut sesuai dengan moral dan agama, atau adakah batasan-batasan etis yang boleh dilanggarnya. Bagi machiavelli tidak ada kejahatan dalam politik, hanya ada kesalahan kecil semata. Pemimpin hanya memiliki satu-satunya batasan yaitu pemimpin harus menggunakan tujuannya untuk kebenaran dan ia memiliki dasar yang masuk akal dalam mengatakan bahwa cara-cara yang dipilih akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan

Thomas Hobbes adalah salah satu filsuf pengikut pemikiran Machiavelli juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Machiavelli, yaitu teori negara kekuasaan sebagai levhiatan.¹²

¹⁰ Sri Hartuti Puspita Sari, Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli Tentang Kekuasaan-Tujuan Negara, Jurnal Hukum, No 18.Vol 08. 2001, Hlm 38-39.

¹¹ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Translated and ed. Thomas G Bergin, Hal 23.

¹²M. Sastrapratedja dan Franz M. Parera. Sang Penguasa, Surat-surat Kenegaraan untuk Umat Lorenzo De Medici. Jakarta: Gramedia. Hal xxx-xxxi

Menurutnya negara harus memiliki kekuasaan yang mutlak dan selalu mengancam individu demi terciptanya perdamaian dan terhindar dari peperangan.¹³ Negara dalam pandangan Hobes ini memberikan kebebasan bagi pemimpin untuk dapat melakukan apa saja demi kebaikan negara. Dengan alat-alat kekerasan yang telah dilembagakan, sehingga penguasa berhak memaksa warganya untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.¹⁴

Pemimpin dalam mengamankan kekuasaannya dalam pandangan Machiavelli instrumen utamanya adalah kekuatan militer. Menurutnya, kekuasaan harus diwujudkan dengan adanya angkatan perang atau militer yang kuat dan Tangguh, dan pemimpin harus mewujudkan untuk melindungi rakyat. Namun hal ini patut dikhawatirkan karena akan menimbulkan destruksi kekuasaan yang lebih besar. Apabila instrument kekuatan militer menjadi utama maka apapun yang dianggap mengancam kekuasaan dari manapun datangnya harus berhadapan dengan represif militer. Besar kemungkinan hal ini juga berlaku terhadap rakyat yang diduga mengobarkan perlawanan terhadap negara dan mengancam kekuasaan. Jelas ini berlawanan dengan tujuan dari negara yaitu untuk melindungi seluruh rakyat. Sehingga tujuan negara menjadi berfokus bagaimana pemimpin mempertahankan kekuasaannya. Jika hal ini terjadi maka pemimpin dengan mengatasnamakan negara dapat melakukan segala cara bahkan dengan kekerasan fisik untuk membuat rakyat patuh akan aturan-aturan yang dibuatnya.¹⁵

Di Jerman ada suatu paham fasis yang muncul pada perempatan abad ke xx, yaitu pada Perang Dunia ke II. Paham ini di dirikan oleh Hitler, yaitu merupakan politisi Jerman yang berambisi

¹³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001) Hal 165

¹⁴ Wahyuni Della Sari, *Kritik Teori Kekuasaan Dan Agama Machiaveli berdasarkan pandangan Murthada Mutahari*, (Skripsi, STFI Sadra, Jakarta 2017).

¹⁵ M. Sastrapratedja dan Franz M. Parera. *Sang Penguasa, Surat-surat Kenegaraan untuk Umat Lorenzo De Medici*. Jakarta: Gramedia. Hal xxx-xxxii

untuk menguasai pemerintahan dunia. Dalam salah satu prinsipnya, paham fasisme ini mirip dengan Machiavelli, yaitu asas perilaku yang di dasarkan kepada kekerasan dan kebohongan. Dalam pandangan Fasisme, negara adalah satu tidak ada yang namanya oposisi. Hal ini menyebabkan apabila ada yang bertentangan dengan aturan negara maka akan dianggap musuh dan harus dimusnahkan. Setiap rakyat dipaksa mengakui kebenaran aturan dan segala hal yang bersangkutan dengan pemerintah atau pemimpin melalui doktrin.¹⁶ Hal di atas mengindikasikan pemimpin yang berambisi untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun termasuk kekerasan. Rakyat berkemungkinan juga menerima hukuman apabila tidak patuh pada doktrin pemerintah atau pemimpin. Pemimpin hanya berfokus pada bagaimana mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya, sehingga melupakan tujuan negara yaitu melindungi seluruh rakyat.

Model kepemimpinan Hitler tersebut menjadi suatu gambaran mengenai kepemimpinan yang cenderung memisahkan unsur moral dalam praktek kekuasaannya, yang kemudian model kepemimpinan seperti ini dapat membawa kesengsaaraan bagi rakyat dan hilangnya hak-hak individu dalam suatu negara.

Berbeda dengan Machiaveli, menurut Al-Farabi, pemimpin ideal haruslah memiliki dua kriteria utama, yaitu berpengetahuan (teoritis) dan bermoral (praktis). Berpengetahuan bermakna bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang luas sehingga ia mampu untuk memberikan solusi bagi permasalahan disuatu negara dan mampu untuk membimbing rakyatnya. Selain itu, pemimpin juga haruslah bermoral agar seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaannya

¹⁶ Ario, Rahmana Putra, *Ideologi Fasisme (Pemikiran Adolf Hitler atas Konsep Fasisme di Jerman)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014. Hal 21

dan dalam prakteknya seorang pemimpin tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji yang merupakan tindakan tidak bermoral.¹⁷

Kajian tentang kosep kenegaraan bukanlah kajian yang tergolong baru dalam dunia filsafat, baik dalam filsafat Islam maupun filsafat Barat. Beberapa filusuf muslim seperti Ibnu al-Muqaffa dan Al-Kindi sebelumnya telah membahas tentang kenegaraan. pada zamannya (106-145 H = 724-762 M) Ibnu al-Muqaffa telah membicarakan mengenai pemerintahan dan Al-Kindi telah menulis 12 buku menyangkut politik, namun mengenai kenegaraan yang lengkap dengan berbagai konsepsi serta teori politiknya barulah dimulai oleh Al-Farabi melalui karya besarnya yakni Al-Madinnah al-Fadillah (260-339 H = 870- 950 M). Dalam teori Al-Madinnah al-Fadillah Al-Farabi menjelaskan konsep kekuasaan yang dapat membentuk suatu negara dalam bentuk negara ideal. Konsep negara ideal Al-Farabi banyak mencontoh bentuk kepemimpinan rasul sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Sikap kepemimpinan rasul menjadi tolak ukur kecenderungan Al-Farabi dalam melahirkan pemikiran mengenai konsep kenegaraan.¹⁸

Dari apa yang dijelaskan di atas, kemudian peneliti tertarik untuk menghadirkan kembali pemikiran politik al-Farabi tentang moralitas pemimpin ideal yang dipaparkan dengan jelas dalam konsep negara utama al-Farabi, sebagai pembanding dari pemikiran Machiavelli terkait teori kuasa. Karena bagi penulis pemikiran al-Farabi terkait politik lebih relevan sebagai solusi dari beberapa model kepemimpinan yang memisahkan moral dan kekuasaan. Al-Farabi adalah salah satu filsuf Islam yang sangat kosen dalam topik kenegaraan dan politik, bukan hanya dari segi moral dan religiusitas,

¹⁷ Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, (Al-Qohirah : Hindawi li al-ta'lim wa al-saqafah, 2016)

¹⁸ Mahmuda, Konsep Negara Ideal atau Utama (Al-Madinnah Al-Fadillah) Al-Farabi) UIN Medan, Vol 2, 2017, Hal 288

melainkan juga dengan kajian-kajian filsafat khususnya filsafat Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjelasan di latar belakang, dalam perkembangan politik selalu menyinggung kekuasaan dan moral. Kemudian di era Machiavelli atau *Renaissance* penyatuan kekuasaan dan moral mulai ditolak keberadaannya. Bahwasannya mereka memisahkan antara moral dan kekuasaan, yang artinya pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya tidak membutuhkan peran moral. hal ini berdampak pada sikap pemimpin yang semena-mena dalam memimpin suatu negara. Bahkan pemimpin dapat melakukan berbagai macam cara apapun itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam hal ini moralitas pemimpin berperan untuk mengembalikan tujuan kekuasaan yaitu untuk melindungi seluruh masyarakat yang dipimpin.

Menurut Al-Farabbi, pemimpin ideal harus memiliki dua kriteria yaitu berpengetahuan dan bermoral. Pemimpin harus bermoral agar pemimpin tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Bagaimana pemimpin ideal menurut Al-Farabbi? Lalu bagaimana relevansi konsep pemimpin ideal al-Farabi atas teori kuasa Machiavelli?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, Adapun masalah pokok yang terdapat pada skripsi ini adalah bagaimana relevansi konsep pemimpin ideal al-Farabi atas teori kuasa Machiavelli, pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya tidak membutuhkan moral.

Machiavelli membuat pemisah antara moral dan kekuasaan. Sedangkan Al-Farabbi mengatakan dalam negara utamanya, bahwa pemimpin ideal harus memiliki dua kriteria yaitu, berpengetahuan dan bermoral. Untuk mengkaji pandangan

Al-Farabbi mengenai konsep pemimpin ideal, dibutuhkan analisis mendalam terhadap hal-hal yang mendasari pemikiran Al-Farrabi mengenai pemimpin ideal dalam konsep negara utama. Dalam menjawab masalah pokok tersebut, maka penulis merumuskan ke dalam beberapa pertanyaan, seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teori kuasa menurut Machiavelli?
2. Bagaimana Relevansi konsep pemimpin ideal al-Farabi atas teori kuasa Machiavelli?

E. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini ada beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjelaskan teori Kuasa Machiavelli
2. Menjelaskan relevansi konsep pemimpin ideal al-Farabi atas teori kuasa Machiavelli.

F. Manfaat

Dalam penelitian ini ada tiga manfaat yang dapat diberikan, yaitu:

1. Manfaat untuk diri sendiri: sebagai syarat dalam meraih kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra (STAI) Sadra dalam bidang filsafat Islam
2. Manfaat untuk Kampus STAI Sadra :
 - a) Memberikan kontribusi pemikiran bagi Kampus STAI Sadra terkait kajian tentang moral, pemimpin dan kekuasaan.
 - b) Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi STAI Sadra yang juga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemikiran Alfarabi terkait

moralitas pemimpin ideal, dan juga terkait konsep kuasa Machiavelli.

- c) Memberikan sumbangsih dalam pengembangan pemikiran Filsafat Islam yang diharapkan mampu untuk memajukan kembali semangat pendidikan terutama dalam bidang filsafat politik Islam.
3. Manfaat untuk Masyarakat: penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat terutama mengenai moralitas pemimpin ideal Al-Farabi agar dapat diterapkan oleh para pemimpin di lingkungan masyarakat sampai tingkat terkecil.

G. Kajian Pustaka

1. Skripsi: Akbar Dwianto, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *“Konsep Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Al-Farabi dan Relevansinya Bagi Negara Indonesia.”*¹⁹

Fokus dari skripsi ini adalah bagaimana konsep politik kenegaraan Al-Farabi yang tertulis dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah. Tulisan ini, menyoroti pemimpin negara khususnya di Indonesia pada masa ini yang tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Hal ini dikarenakan tindakan pemimpin tidak sesuai dengan perkataannya. Sehingga tindakannya tidak mencerminkan konsep negara utama yang terdapat dalam Al-Madinah Al-Fadilah. Dalam tulisan tersebut, peneliti memberikan gambaran mengenai konsep negara ideal menurut Al-Farabi yaitu seperti suatu organ dari tubuh manusia yang merupakan satu kesatuan, dengan fungsi satu sama lain saling melengkapi. Dari konsep negara ideal tersebut kemudian dikaitkan dengan negara kesatuan republik Indonesia dengan mencari relevansinya. Penulis

¹⁹ Akbar Dwiyanto, *Konsep Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Al-Farabi dan Relevansinya Bagi Negara Indonesia*,(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 2018.

dalam tulisan tersebut kemudian berkesimpulan bahwa dalam konsep negara utama Al-Farabi, masyarakat adalah unsur terpenting dalam suatu negara karena dalam konsep negara utama, masyarakat harus bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama dalam meraih kebahagiaan. Dalam konsep negara ideal, negara diibaratkan satu tubuh sehat yang memiliki organ-organ penting yang satu sama lain saling bekerja sama. Dalam konsep ini juga, pemimpin ideal haruslah memiliki pengetahuan luas serta ahlak yang hampir menyerupai nabi agar kemudian dapat membimbing rakyatnya menuju kebahagiaan yang hakiki. Penelitian yang ditulis oleh peneliti terdahulu memiliki kesamaan dengan apa yang tengah peneliti kaji dalam skripsi ini, yakni sama-sama mengkaji pemikiran politik Al-Farabi dalam karyanya *Al-Madinnah Al-Fadillah*. Namun yang menjadi perbedaan adalah peneliti saat ini lebih berfokus pada relevansi konsep pemimpin ideal al-Farabi pemikiran politik Machiaveli terkait teori kuasa.

2. Skripsi yang berjudul “ *Konsep Kepemimpinan Dalam Negara Utama Al-Farabi*” yang ditulis oleh ygMuhammad Fanshobi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁰

Tulisan ini hanya fokus membahas tentang konsep kepemimpinan dalam pemikiran Al-Farabi dengan berangkat dari latar belakang adanya negara utama dan bagaimana pengangkatan pemimpin negara utama. Pengangkatan pemimpin negara utama dihubungkan dengan prinsip pengangkatan imam dalam madzhab syiah. Menurutnya, Al-Farabi tidak membahas mekanisme pengangkatan pemimpin dengan detail sebagaimana pandangan pemikir politik kontemporer, melainkan hanya menjelaskan ciri dan kriteria pemimpin. Dari kriteria tersebut, ia ingin mencocokkan bahwa kriteria pemimpin utama itu sama dengan imam dalam

²⁰Muhammad Fanshobi, *Konsep Kepemimpinan Dalam Negara Utama Al-Farabi*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

asdzhab syiah tanpa menjelaskan dengan rinci konsep imamah dalam madzhab syiah. Ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana relasi agama dan bagaimana cara mencapai kriteria pemimpin negara utama. Penelitian yang ditulis oleh peneliti terdahulu memiliki kesamaan dengan apa yang tengah peneliti kaji dalam skripsi ini, yakni sama-sama mengkaji pemikiran politik Al-Farabi dalam hal kepemimpinan. Namun yang menjadi perbedaan adalah peneliti saat ini lebih berfokus pada relevansi konsep pemimpin ideal al-Farabi terhadap konsep kuasa Machiavelli.

3. Jurnal yang berjudul “ *Pemimpin Ideal Perspektif Hadis*”, yang ditulis oleh Anisatun Muti’ah, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.²¹

Tulisan ini hanya berfokus tentang pemimpin ideal perspektif hadis, yang mana dalam ajaran islam pemimpin dijadikan sebagai penolong umat dalam segala hal. Penulis perpacu pada keteladanan nabi Muhammad sebagai pemimpin umat islam. Tidak ditemukan latar belakang masalah yang jelas di dalam penelitian yang ditulis Annisatun ini. Kesamaan penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti adalah topik yang diambil yaitu pemimpin ideal, hanya saja penelitian Annisatun ini hanya membahas pemimpin ideal perspektif hadis. Sedangkan peneliti ingin membahas konsep pemimpin ideal Al-Farabi sebagai relevansi atas pemikiran politik Machiavelli terkait teori kuasa.

4. Skripsi yang ditulis oleh Wahnyuni Della Sari dari Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta, dengan judul, *Kritik Teori Kekuasaan Dan Agama Machiaveli berdasarkan pandangan Murthada Mutahari*.²²

²¹Anisatun Muti’ah, *Pemimpin Ideal Perspektif Hadis*, (Jurnal: IAIN Nurjati, Cirebon, 20

²² Wahnyuni Della Sari, *Kritik Teori Kekuasaan Dan Agama Machiaveli berdasarkan pandangan Murthada Mutahari*, (Skripsi, STFI Sadra, Jakarta 2017).

Penelitian ini berfokus pada teori Machiavelli mengenai kekuasaan dan agama yang kemudian dikritik melalui pandangan Murthada Mutahari tentang kekuasaan dan agama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman Machiavelli terkait negara dan kekuasaan yang menurutnya haruslah dipisahkan dari agama maupun moralitas, karena baginya tidak ada kaitan yang relevan antara agama dan kekuasaan, kecuali sejauh mana agama dan kekuasaan itu mempunyai nilai utilitarianisme bagi kekuasaan dan Negara.

Kesimpulan dari skripsi yang ditulis Della yaitu, teori kekuasaan Machiavelli pada dasarnya bertumpu pada bangunan matrealisme tentang manusia yang mana selanjutnya berimplikasi pada pandangannya terkait kekuasaan. Yaitu dalam tujuan politiknya hanya didasarkan pada upaya untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya. Bagi Machiavelli, kekuasaan hanya menyangkut tentang kekuatan, yakni berbicara tentang bagaimana menjatuhkan lawan dengan menghalalkan segala cara demi meraih atau merebut kekuasaan dan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan yang telah digenggam. Dalam hal ini, Machiavelli menganggap agama hanyalah ekspresi spiritualitas individu. Mutahari menolak pandangan mengenai kekuasaan hanya bersifat horizontal, bagi Mutahari, kekuasaan sifatnya Vertikal dan horizontal. Kekuasaan yang bersifat vertikal dicontohkan dengan konsep *Imammah*, Mutahari sangat menolak pandangan bahwa kekuasaan hanya dilihat dari segi kekuatan untuk menaklukkan atas dasar nafsu kekuasaan. Baginya kekuasaan adalah salah satu nilai Insani dan kesempunaan bagi manusia. Penelitian yang ditulis oleh Della memiliki persamaan dengan penelitian saat ini, yakni terkait pandangan Murthada Mutahari, yang dalam penelitian Della disinggung mengenai hakekat manusia dalam pandangan Mutahari dan disinggung juga tentang hakekat manusia dalam pandangan Thomas Hobbes. Namun yang menjadi pembeda adalah fokus dari penelitiannya, dalam hal

ini penelitian saat ini lebih berfokus pada relevansi konsep pemimpin ideal Al-Farabi atas teori kuasa Machiavelli.

5. Tesis yang ditulis oleh Ade Afriansyah S.Fil.I salah satu mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kali jaga Yogyakarta yang berjudul “ *Pemimpin ideal menurut Al-Ghazali* ”.²³

Penelitian di atas hanya fokus membahas pandangan Al-Ghazali mengenai pemimpin ideal. Berangkat dari latar belakang bahwa kebanyakan pemimpin baik pemimpin dalam aspek kehidupan, aspek agama, aspek spiritual maupun negara telah memisahkan atau meninggalkan berbagai aspek penting yang seharusnya melekat pada diri pemimpin. Kemudian hal tersebut mengakibatkan kegagalan pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya dan dapat menghancurkan tatanan perpolitikan. Pengangkatan pemimpin ideal Al-Ghazali dihubungkan dengan tipe pemimpin ideal menurut Al-Ghazali yaitu intelektual, agama dan akhlak. Yang mana tipe pemimpin Al-Ghazali dianggap penulis dapat membantu mengobati kehancuran dan kerusakan dalam diri bangsa Indonesia serta menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang adil makmur dengan ditopang moral yang bersendikan agama. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas topik pemimpin ideal, namun yang tulis oleh Ade hanya berfokus pada pemimpin ideal menurut Al-Ghazali saja. Sedangkan yang teliti oleh peneliti saat ini adalah relevansi konsep pemimpin ideal al-Farabi atas teori kuasa Machiavelli.

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah rangkaian cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu demi mencapai target atau tujuan tertentu. Kemudian, penelitian adalah mencari kembali sesuatu untuk mengetahui

²³ Ade Afriansyah, *Pemimpin ideal menurut Al-Ghazali*, (Tesis, UIN Sunan Kali jaga Yogyakarta,2014)

sesuatu sehingga mendapatkan pengetahuan yang benar.²⁴Namun, metode yang digunakan disesuaikan dengan jenis penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti di sini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan aspek penafsiran deskriptif suatu fenomena ataupun makna suatu konsep. Sehingga, jenis penelitian ini bisa diterapkan pada penelitian pustaka. Penelitian kualitatif tidak terbatas pada teknik pengumpulan data tertentu, hasil dari penelitian kualitatif juga ditujukan bukan untuk mencapai suatu generalisasi, melainkan makna. Dalam jenis penelitian ini, pendekatan maupun metode penelitian pun tidak terbatas pada satu macam.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis dalam menguraikan data-data yang ditemukan. Data-data yang dideskripsikan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif. Namun, karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, lebih ditekankan pada proses daripada produk penelitian.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses analisis data ialah pendekatan filosofis. Data-data yang diuraikan secara deskriptif akan dianalisis dan diuji secara rasoional berbasis pada prinsip awwaliyat.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan suatu rujukan atau sumber dimana data-data penelitian ini diperoleh. Data yang terambil dari penelitian ini berasal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yakni data primer dan data sekunder. Data

²⁴ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), Hal. 7

²⁵Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hal 10

primer adalah data yang memberikan informasi langsung kepada peneliti terkait data-data yang tengah diteliti, data ini biasanya diperoleh langsung dilapangan atau dari *library research*.²⁶ Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung yang secara langsung atau pun tidak langsung berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut berupa tulisan dalam bentuk jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Adapun sumber primer yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu :

2. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, '*Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, (Al-Qohirah : Hindawi li al-ta'lim wa al-saqafah, 2016)
3. Al-Farabi, *Tahsil Al-Sa'adah*, (Libanon : Dar wa Maktabah Al-Hilal, 1995)
4. Al-Farabi, *Al-Siyasah Al-Madaniyah*, (Beirut : Dar Al-Masyriq, 1993)
5. Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Translated and ed. Thomas G Bergin

Adapun sumber sekunder yang peneliti gunakan ialah

1. Selo Soemardjan, Pola-Pola kepemimpinan Dalam Pemerintahan, ceramah pada Coaching Management Lembaga Pertahanan Nasional, 7 Maret 1967, tidak diterbitkan, dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
2. Lestiyono santoso, *Tinjauan Filsafat Politik tentang relasi Moral dan Kekuasaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*, 2017, desertasi, Universitas Gajah Mada.
4. Aniek, Rumijati, *kekuasaan dan moralitas, sebuah pengantar kearah pemahaman organisasi*, jurnal ilmiah bestari, no.32.Th.XIV. 2001.
5. David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995).
6. Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001)

²⁶ Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), Hal 143.

7. El-Affendi, Abdel Wahab, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 1994)
8. Sri Hartuti Puspita Sari, *Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli Tentang Kekuasaan-Tujuan Negara*, *Jurnal Hukum*, No 18. Vol 08. 2001.
9. M. Sastrapratedja dan Franz M. Parera. *Sang Penguasa, Surat-surat Kenegaraan untuk Umat Lorenzo De Medici*. Jakarta: Gramedia.
10. Wahyuni Della Sari, *Kritik Teori Kekuasaan Dan Agama Machiaveli berdasarkan pandangan Murthada Mutahari*, (Skripsi, STFI Sadra, Jakarta 2017).
11. Ario, Rahmana Putra, *Ideologi Fasisme (Pemikiran Adolf Hitler atas Konsep Fasisme di Jerman)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014
12. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, (Al-Qohirah : Hindawi li al-ta'lim wa al-saqafah, 2016)
13. Mahmuda, *Konsep Negara Ideal atau Utama (Al-Madinnah Al-Fadillah) Al-Farabi* UIN Medan, Vol 2, 2017

I. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan data penelitian ini bersifat pustaka, maka teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi di mana data yang dicari bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, dan sebagainya.²⁷ Caranya, peneliti akan mencari data-data dari sumber primer. Selanjutnya akan dilengkapi dengan data-data dari sumber sekunder untuk memperluas pengetahuan tentang pembahasan dalam penelitian ini.

A. Sistematika Penelitian

²⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Hal. 225

Terdapat urutan pembahasan yang diteliti secara sistematis yang perlu diketahui sebagai arahan secara umum sehingga pembaca dapat mengetahui gambaran penelitian ini.

Bab pertama, bab ini berisikan latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian ini sehingga menjawab pentingnya penelitian ini dilaksanakan. Setelah itu, diurai identifikasi masalah yang ada pada latar belakang. Kemudian batasan masalah sebagai garis fokus masalah. Selanjutnya rumusan masalah dari batasan masalah yang akan dijawab pada bab berikutnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka untuk menunjukkan perbedaan dan kesamaan penelitin ini dengan penelitian sebelumnya, metodologi penelitian sebagai cara yang ditempuh selama meneliti, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang biografi dan latar belakang pemikiran, filsafat politik Machiavelli, etika dan moral, perbedaan etika dan moral, dan kekuasaan.

Bab ketiga, pada bab ini, akan dibahas biografi dan latar belakang pemikiran al-Farabi, pemikiran politik al-Farabi, dan konsep pemimpin ideal al-Farabi.

Bab keempat, berisikan analisis terkait teori kuasa Machiavelli dan relevansi pemikiran al-Farabi terkait konsep pemimpin ideal atas teori kuasa Machiavelli.

Bab kelima, pada bab ini, dipaparkan kesimpulan dari jawaban atas masalah penelitian. Setelah memaparkan kesimpulan, dipaparkan juga saran yang ditujukan bagi pembaca.

BAB II

Pemikiran Filsafat Politik Machiavelli

A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pemikiran

Machiavelli merupakan seorang negarawan yang lahir di Italia pada tahun 1469. Machiavelli lahir pada masa peralihan antara abad pertengahan menuju masa renaissance di kota Florence, keturunan keluar kuno Tuscan.²⁸ Florence adalah salah satu kota yang berkembang karena ramainya kembali perdangan Timur-Barat akibat perang salib. Kemudian negara ini berkembang menjadi negara (polis). Pemikiran politik Machiavelli tidak lepas dari peranan orang tuanya. Ayah Machiavelli merupakan ahli hukum terkenal di Italia yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan pada kantor pajak dan menangani urusan public di negara Florence, ia bernama Bernardo Machiavelli sedangkan ibunya bernama Bartolomea de' Nerli.²⁹

Pada usia 6 tahun Machiavelli sudah mempelajari bahasa batin, kemudian pada usia 12 tahun sudah mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan dari Paulo Ronsiglione. Di usia 14 tahun ia telah mampu menulis karangan dalam Bahasa latin dengan meniru gaya klasik. Machiavelli menyukai karya klasik dikarenakan ayahnya merupakan pengagum karya klasik Yunani dan romawi, seperti karya Livius "*History*" atau karya Cicero "*Philipus dan An Moral Obligation, and The Making of an Orator.*"³⁰ Setelah mendapatkan Pendidikan dari Paulo Rosiglione, Machiavelli kemudian melanjutkan Pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Florence dengan mengikuti kajian klasik Bersama Marcello Adriani.³¹ Kemudian untuk riwayat Pendidikan Machiavelli tidak ada yang jelas di mana Machiavelli menimba ilmu. Akan tetapi

²⁸ Soehino, *Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), Hal 70.

²⁹ Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa*, cet. 6, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hal xvii-xviii

³⁰ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal 126.

³¹ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideology, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ketiga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hal 106.

pada beberapa literatur dijelaskan bahwa Machiavelli mengikuti saran ayahnya untuk menjadi orang terkemuka dengan mempelajari ilmu tentang kemanusiaan. Sehingga Machiavelli tumbuh menjadi sosok politikus yang memiliki ide kongkreat, praktis, mengutamakan setiap tindakan³²

Filsafat politik Machiavelli lahir setelah melalui fase perjalanan politik yang cukup panjang. Pada usia 25 tahun Machiavelli menyaksikan peristiwa politik yang menyebabkan perubahan kekuasaan di Florence pada tahun 1494, yaitu perjuangan Giotlamo Savonara dalam merebut kekuasaan dari keluarga Medici. Savonara merupakan seorang politikus moral yang kuat memegang ajaran konservatif gereja serta kenjar menegakkan faham sekuleris humanis dan membela rakyat miskin.³³ Kemudian persaingan perebutan kekuasaan ini di menangkan oleh Savoranola yang dibantu oleh intervensi asing yakni raja Charles VIII. Dari kejadian di atas Machiavelli melihat bagaimana runtuhkan kekuasaan keluarga medici yang telah memerintah negara Florence selama bertahun-tahun dengan gaya aristocrat bergaya humanis dan sekuler yang tidak mendapat dukungan dari rakyat biasa, Ketika ia melihat bagaimana Savonara yang melawan bentuk Gerakan manajemen yang teokratis yang dekat dengan kehidupan rakyat jelata.³⁴

Gerakan Savonara hanya bertahan empat tahun, dikarenakan gerakan ini hanya mendapat dukungan sementara dari masa. Hal ini dimonitori oleh komplotan elit yang bekerjasama dengan paus ingin menjatuhkan Savoranola. Kemudian dijelaskan oleh Machiavelli bahwa kultur politik yang dijalankan Savoranola menjadi ahistoris karena ia mengaitkan kekuasaan dan moralitas yang tidak sesuai dengan konteks sejarah pada masanya.

³² Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa*, cet. 6, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hal xix.

³³ Haura Atthahara, *Perspektif Ideologi dan Kekuasaan dalam Pemikiran Machiavelli: Studi Khusus Pemilihan Presiden 2019*, Vol. 4 No. 1 (Bandung: Jurnal, 2020), Hal 80.

³⁴ Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa*, cet. 6, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hal xx-xxi.

Setelah digulingkannya rezim teokratis pada tahun 1498-1512 kemudian berdiri republic Florence yang dipimpin oleh Soderini, yang merupakan kerabat dekat dari Machiavelli. Kemudian Machiavelli mengawali karirnya di bidang politik. Pada usia 29 tahun ia menduduki posisi strategis yakni sebagai sekretaris (*second chancellor*) yang merangkap menjadi anggota majelis sepuluh, yang merupakan badan penasihat presiden yang berwenang memberi nasihat dalam operasi militer dan juga menjadi diplomat untuk luar negeri dan hubungan internasional. Machiavelli menjalani politik praktis selama 14 tahun. Dari pengalaman secara ini secara naluri ia memiliki pemikiran yang tajam mengenai politik dan ketentaraan. Kemudian ia menyimpulkan dua hal yang harus diperhatikan dalam politik yakni kekuatan dan muslihat untuk mempertahankan kekuasaan.³⁵

Pada tahun 1512 kekuasaan Soderini direbut Kembali oleh cardinal Geovani de Madici putra dari Lorenzo de' Medici. Kejadian ini membuat karir politik Machiavelli, karena Lorenzo II de' Medici semua kaki tangan Soderini dilepas dari kekuasaan dan wewenang serta disingkirkan dari panggung perpolitikan Florence. Pada tahun ini Machiavelli dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan terlibat dalam komplotan melawan penguasa yang sah Medici. Tetapi atas bantuan sahabatnya yang berpengaruh akhirnya ia dibebaskan dari hukuman penjara dan dipensiunkan pada umur 44 tahun.³⁶

Machiavelli kemudian menjalani masa "Rehabilitasi" politiknya dengan berdiam di sebuah perkebunan miliknya di San Cassiano di luar kota Florence dan melarangnya menginjakkan kaki di wilayah Florence. Dalam suratnya kepada temannya Vettori, Machiavelli mnelukiskan keadaan itu sebagai pembalikan nasib.

³⁵ Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), Hal 18.

³⁶ Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa*, cet. 6, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hal xxiv-xxv.

“Aku tinggal di wilayah ini karena rasa malu saya. Aku bangun saat fajar dan pergi ke hutan kecil tempat kulihat orang menghasilkan karya (oleh penebang kayu)”.³⁷

Masa-masa ini menjadi tahap ketiga dari perjalanan politik Machiavelli. Pada masa ini, Machiavelli melanjutkan karir politiknya dengan menulis tulisan yang berdasarkan dengan pengamatannya tentang politik. Banyak yang beranggapan bahwa karya yang dihasilkan Machiavelli semata-mata untuk mencari muka kepada penguasa Florence pada masa itu Lorenzo II Medici. Terlepas dari anggapan orang-orang kepadanya, Machiavelli telah sukses menulis beberapa karya besar yang menjadi loncatan besar menuju politik modern. Adapun beberapa karya yang dihasilkannya selama pengasingan seperti *II Principe* atau *The Prince*, *Art Of War* atau *Seni Berperang*, lalu dalam Bahasa kesustraan *Dialogue on Language*, *Mandragola* dan *Cilizia*, *Discourses Upon Livy* dan *History Of Florence*.³⁸

Di antara beberapa karya Machiavelli, *II The Principe* merupakan karya yang paling terkenal. *The Prince* di tulis pada tahun 1513. Dalam tulisan ini Machiavelli berusaha menyikapi peristiwa-peristiwa kontemporer, bagaimana negara-negara dapat dimenangkan, diselenggarakan dan diamburkan. Hal ini ditegaskan oleh Machiavelli dalam tulisannya bahwa karyanya *The Prince* membahas secara lengkap hal yang berkaitan dengan kerajaan dengan memberikan gambaran bagaimana kerajaan itu berkembang atau gagal. Serta tidak lupa menjelaskan metode yang digunakan untuk merebut dan mengusainya.³⁹

Karyanya *The Prince* di satu sisi merupakan pendobrakan terhadap sistem skolastik yang dipraktekan dalam kehidupan di Italia pada masa itu. Ketika kita membaca buku ini, kita tidak akan menemukan doktrin-doktrin yang khas pada masa skolastik, akan tetapi kita akan menemui asumsi-asumsi yang lahir dari

³⁷ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Terjemah oleh Natalia Triaji, , Cet I, (Ecosystem Publishing: Surabaya, 2018),

³⁸ Betrand Russell, *History of Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances From the Earliest Times to the Present Day*, Hal 505.

³⁹ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Translated and ed. Thomas G Bergin, (United State of America: F.S Crofts and Co., INC, 1947), Hal 33-34.

aktualisasi pengalaman empiris selama 14 tahun masa politik praktis yang dialami Machiavelli yang kemudian dituangkan dalam tulisan terkait metode politik yang lihai dan penuh strategi untuk mempertahankan kekuasaan demi stabilitas negara dan pemegang kekuasaan. Ciri renaissance akan terkuak pada buku ini, karena Machiavelli menggambarkan konsep realitas politik dengan mengomparasikan antara kondisi politik dahulu dengan kondisi politik Italia yang terpecah pada masa itu.

Renaissance sendiri berarti diartikan sebagai kelahiran Kembali. Sedangkan secara historis renaissance merupakan gerakan yang meliputi zaman di mana orang merasa dirinya telah dilahirkan Kembali dalam peradaban. Gerakan renaissance bermula dari semangat retorik yang berkembang pada masa klasik. Dimana para kaum humanis memandang bahwa kebudayaan klasik adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama atau dapat diartikan sebagai tolak ukur standar moral dalam menuntun segala macam kegiatan budaya.⁴⁰ Hal ini mereka sadari setelah mengalami kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran kristiani, mereka merasa tidak puas terhadap ajaran kristiani yang dianggap mengekang manusia.⁴¹

Renaissance di Italia mendapat minat yang cukup kuat terhadap seni dan kebudayaan, tidak heran banyak seniman yang lahir di Italia, Perpolitikan di Italia pada masa itu menunjukkan wujud politik individu yang terjadi antar satu penguasa dengan penguasa yang lainnya. Aktualisasi politik individu ini dapat dilacak dari wilayah moral perebutan kekuasaan yang terjadi. Secara tidak langsung semangat renaissance membawa manusia sadar akan hak-hak individunya, akan tetapi juga menjadi pendukung lahirnya negara nasional modern.⁴² Inilah yang di maksud ciri Renaissance yakni menghadirkan Kembali

⁴⁰Thomas Hidayat Tjaya, *Humanisme dan Skolastik Sebuah Debat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), Hal 18.

⁴¹ Simon Petrus, *Petualangan Intelektual* (Yogyakarta: Kanisius 2004), Hal 176.

⁴² Retno Winarni, *Sejarah Pemikiran Modern*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2014), Hal 16.

kenudayaan klasik yang identik dengan manusia dan kebudayaan ke dalam masa yang penuh akan dogmatisasi gereja.

B. Filsafat Politik Machiavelli

Keberadaan politik tidak bisa lepas dari manusia. Politik sangat melekat pada diri manusia dari awal mula manusia hidup di bumi. Menurut KBBI manusia adalah makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Seorang filsuf barat Thomas Hobbes, manusia tidak hanya dapat berkuasa atas makhluk lain juga sebagai serigala bagi manusia lainnya. Manusia dalam kehidupannya saling beraudisi untuk lebih dari manusia lain. Thomas hobbes mengambil konsepnya tentang “serigala” dari Bibel.⁴³

Thomas Hobbes mengemukakan pendapat yang sama dengan Machiavelli, yaitu teori negara kekuasaan sebagai leviathan (Mahluk raksasa). Menurutnya, kekuasaan muncul karena adanya persaingan yang terjadi antar manusia. Hal ini secara alamiah terjadi mengikuti keinginan-keinginan dalam diri manusia untuk memenuhi hawa nafsunya.⁴⁴ Kemudian manusia akan selalu berusaha berbagai cara untuk mengapai apapun yang ia inginkan dan yang tidak ia inginkan. Karena pada dasarnya fitrah manusia tunduk pada hawa nafsunya, sehingga hidup manusia penuh dengan konflik kekuasaan.⁴⁵

Menurut Hob, manusia memiliki penderitaan dalam hidup sehingga manusia akan melakukan segala sesuatu untuk menghilangkan penderitaan hidupnya. Itulah kenapa Thomas Hobbes dikatakan sebagai filsuf *right law* dan menolak kategori-kategori moral. Maksudnya manusia beraktivitas tidak berdasarkan pada tanggung jawab moral melainkan pada pemenuhan hak individu manusia itu sendiri. Hak disini perihal

⁴³ Thomas Hobbes of Malmesbury, *Leviathan* (London: the Green Dragon in St. Pauls Church-yard, 1651), Hal 312.

⁴⁴ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal 170-171.

⁴⁵Michael Lessnoff, *The Social Contract: Issues in Political Theory*, (London:Macmillan, 1986), Hal 50.

kemanfaatan apa yang manusia kehendaki. Menurutntya, manusia pada dasarnya hidup tidak untuk memusingkan kepentingan orang lain. Kemudian relasi ini memunculkan keadaan kacau yang dipenuhi egoisme, individualisme, dan kesengsaraan.

Keadaan inilah yang menjadi alasan manusia lantas “bersosialisasi” dengan manusia lain dalam wujud relasi kontrak sosial. Manusia menyerahkan dirinya untuk hendak diatur dalam hukum yang disepakati bersama, hukum yang akan menindak siapapun yang membawa bahaya bagi orang lain. Keadaan manusia yang semula “merdeka” berubah menjadi terikat oleh hukum. Manusia-manusia lalu membentuk organisasi, yang disebut masyarakat (society) dan pranata-pranata, berinteraksi untuk menyusun kontrak-kontrak sosial dan memastikan bahwa tidak ada satu pun yang telah dikontrakkan tersebut akan dilanggar.⁴⁶

Berbeda dengan pemikiran Thomas Hobbes, Thomas Aquinas mengembangkan konsep politiknya didasari oleh alam,, dimulai dari manusia. Menurutnya manusia memiliki tujuan hidup yang sudah digariskan oleh alam. Akan tetapi, manusia tidak sama dengan mahluk lainnya, manusia memiliki akal sebagai pembeda dirinya dengan mahluk lain. Kemudian dari akallah manusia dapat memahami tujuan dan mengarahkan pada tujuan tersebut. Manusia tidak hanya tunduk pada hukum alam, melainkan juga pada hukum Tuhan dengan cara yang khusus. Manusia sebagai pelaku hukum dalam hukum ini, dengan kata lain manusia sendiri yang mengendalikan tindakannya dan tindakan mahluk lain.⁴⁷

Thomas Aquinas mengembangkan pemikiran politiknya yang berangkat dari pemahaman manusia sebagai binatang sosial (*a social and political animal*). Manusia nyatakan sebagai mahluk sosial karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. ia membutuhkan orang lain untuk

⁴⁶ Eriehtha Eleison Sembiring, Filsafat Manusia , maret 2020, jurnal

⁴⁷ Wahyuni Della Sari, *Kritik Teori Kekuasaan Dan Agama Machiaveli berdasarkan pandangan Murthada Mutahari*, (Skripsi, STFI Sadra, Jakarta 2017), Hal

mencapai tujuannya. Sehingga negara hadir sebagai agen pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh individu atau kelompok dalam skala kecil.⁴⁸ dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manusia pada dasarnya harus berinteraksi dengan lainnya.

Namun, hubungan sosial yang tidak teratur akan menyebabkan kekacauan antarmanusia. Sehingga, diperlukan suatu kesepakatan bersama dalam membangun suatu ikatan bersama yaitu negara. Sebagaimana halnya alam dan manusia, negara juga memiliki organ-organ yang harus bekerja sesuai pada fungsinya agar menjadi suatu negara yang semestinya.⁴⁹ Menurut Aristoteles, manusia membutuhkan negara sebagai sarana pengaktualisasian watak manusia sebagai *zoon political* (mahluk berpolitik), negara dibutuhkan untuk mengaktualisasikan watak manusia.⁵⁰ Aristoteles menolak kepemilikan Bersama dalam suatu negara. Menurutnya, kepemilikan Bersama tidaklah merepresentasikan tujuan dari sebuah negara, karena kebahagiaan sendiri dilihat dari tatanan yang ada di dalam masyarakat, bukan sekedar komposisi sebagaimana orgasme yang hidup, karena pada dasarnya negari sepenuhnya adalah moral bukan fisik.

Sementara dalam pandangan Santo Agustinus, kekuasaan muncul karena adanya rasa cinta pada diri yang berlebihan dan menuntut untuk meraih segala hal yang bersifat hedonistik dan bersifat duniawi, sehingga keinginan untuk berkuasa muncul dalam diri manusia. Kebajikan yang didasari oleh kepentingan manusia adalah hal yang rapuh karena ia berasal dari cinta diri sendiri yang bersifat temporal dan profan.⁵¹ Berbeda dengan Agustinus, menurut John lock manusia berkuasa karena dibentuk

⁴⁸Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal 96.

⁴⁹Humaidi, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi : Pendasaran Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, dan Agama*, Hal. 106

⁵⁰ Kabul Budiono, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, (Bandung:Alfabeta,2012), Hal 88.

⁵¹ Robert Nisbet, *The Social Philosopher, Community and Conflict in Western Thought*, (New York : Washington Square Press, 1986), Hal 50

oleh kepemilikan individu. Hak kepemilikan individu merupakan suatu bentuk alamiah yang dimiliki manusia. Hak milik yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan, melainkan juga kehidupan dan kebebasan individu.⁵² Kepemilikan individu akan teraktual apabila individu bekerja keras mengelola apa yang telah diberikan tuhan. Dengan demikian kerja dalam hal ini dapat diartikan sebagai nilai yang menentukan besar atau tidaknya penguasaan manusia atas hak kepemilikannya.⁵³ Di sisi lain kekuasaan merupakan daya dorong dari semua perilaku manusia di mana masyarakat mempertahankan hidupnya, berjuang dan berusaha mewujudkan cita-cita kehidupan yang lebih baik. Dilihat dari beberapa pandangan tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan fitrah bagi manusia, sebagai bentuk dorongan dalam diri manusia yang berasal dari cinta diri untuk menguasai orang lain demi kepemilikan individu.

Jika tokoh-tokoh di atas memahami bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang secara inheren ada pada diri manusia, baik karena cinta diri, kepemilikan individu, atau dominasi terhadap lainnya, maka Machiavelli memiliki pemahaman yang berbeda. Machiavelli memahami bahwa kekuasaan berkaitan dengan kekuatan dan muslihat. Kekuasaan menurut Machiavelli hanya tentang kekuasaan dan pengakuan atas kekuatan. Apabila seseorang ingin berkuasa, maka orang tersebut harus dapat melihat peluang untuk meraih kekuasaan tersebut baik menggunakan cara terpuji atau cara tidak terpuji. Yang terpenting menurut Machiavelli adalah mempertahankan kekuasaan.

Machiavelli melihat ada kekeliruan pada masa klasik dalam melihat realitas politik. Kekekuaan pada masa klasik dan pertengahan yang berfokus pada norma dan tujuan hanya melihat dari “apa yang seharusnya,” bukan “apa adanya.” Sehingga pemikiran pada masa itu cenderung mengikuti pendekatan spekulatif Plato ketimbang pendekatan empiris Aristoteles.

⁵²Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal 96.

⁵³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal 195-196.

Ketika kita melihat perangkat institusional, hanya melihat secara umum dan abstrak dan tidak ada upaya untuk menguji hal tersebut dalam pengalaman. Jika kita lihat pemikiran para tokoh filsafat klasik memang tidak lepas dari pembahasan moral dan politik, akan tetapi formulasi teori sebab akibat tidak mengalami kemajuan yang dapat terlihat dan terukur. Memang pada masa itu para filosof hanya berkuat pada pembahasan kekuasaan dan moralitas. Sehingga dibutuhkan cara pandang baru dalam melihat kekuasaan. Machiavelli mengubah konsep ideal bernegara yang sebelumnya pada masa klasik berhubungan dengan hubungan etis negara menjadi berfokus pada tujuan negara itu sendiri. nilai etis dikesampingkan dari tujuan negara karena menurut Machiavelli proses politik semata-mata demi tujuan menentukan kelayakan praktik-praktik dan perangkat institusional dari kekuasaan yang stabil.⁵⁴

Berbeda dengan pemikiran klasik, Machiavelli menaruh perhatian yang besar terhadap kekuasaan yang mengenyampingkan nilai-nilai etis dan moral. Machiavelli merasa tidak puas dengan kondisi politik pada masanya dalam menggambarkan perilaku sosial manusia. Menurutnya, metode yang tepat dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaan harus melalui analisis dan telah diuji dengan cermat. Baginya, metode ini menjadi kewajiban moral bagi penguasa atau pemimpin untuk menggunakan metode tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang meningkat. Konsep politik Machiavelli menggunakan metode komparatif, dengan menghubungkan data empiris yang telah dialami dalam sejarah. Dalam bukunya *The Discourse* ia menjelaskan bahwa yang ia lakukan adalah mengombarasikan apa yang ia alami pada masa lalu dengan napa yang sedang terjadi, sehingga pembaca

⁵⁴ Hendry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, (America: The Bruce Publishing Company, 1960), terj. *Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal 251.

dapat mendapatkan pelajaran atas apa yang telah terjadi dari masa-kemasa.⁵⁵

Machiavelli ingin menciptakan sistem politik baru melalui seperangkat aturan yang dapat diikuti dan menjadi dasar bagi penguasa dalam menjalankan dan pembertahankan kekuasaannya. Politik kekuasaan yang dibangun Machiavelli adalah bahwa tindakan manusia bertujuan untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik. Tidak semua yang buruk akan berdampak buruk, dengan kata lain Machiavelli ingin mengatakan bahwa cara yang buruk apabila dapat berdampak baik bagi kekuasaan maka itu dapat dibenarkan.⁵⁶ Menurutny, seorang pemimpin harus mengabaikan pertimbangan moral sepenuhnya dan mengandalkan segala sesuatunya atas kekuatan, akal, dan memungkinnya juga dengan kelecikan. Dalam mempertahankan kekuasaan dibutuhkan cara kekerasan, keluwesan, hingga tipu-daya bila perlu.⁵⁷ Mungkin hal ini terdengar tidak baik, namun bagi Machiavelli manusia itu sendiri tidak baik. Manusia memiliki kepribadian yang tidak baik dan sering melakukan hal-hal buruk seperti ingkar janji, berbohong, tamak pada kekuasaan, munafik dan lain sebagainya.⁵⁸

Machiavelli membuat buku berjudul *The Prince* (1513) untuk mengembangkan sistem politik kekuasaannya. Buku ini sebagai pegangan manual ringkasan untuk mereka yang ingin memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dan apa yang membuat individu menjadi pemimpin yang efektif. Buku ini terdiri dari 26 bab, di mana dalam setiap bab terdiri dari beberapa pembahasan tentang macam-macam bentuk pemerintahan dan

⁵⁵ Hendry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, (America: The Bruce Publishing Company, 1960), terj. *Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal 252.

⁵⁶ Hendry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, (America: The Bruce Publishing Company, 1960), terj. *Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal 257.

⁵⁷ Niccolò Machiavelli, *The Prince*, Terjemah oleh Natalia Triaji, (Ecosystem Publishing: Surabaya, Cet I, 2018), Hal 143.

⁵⁸ Niccolò Machiavelli, *The Prince*, trans: W. K. Mars; Priott, The Electronic Classic Series, (Pennsylvania University, 2001), Hal 80.

cara mendirikan, posisi agama dan moral dalam kekuasaan, cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dan cara memilih aparaturnya.⁵⁹ Dalam beberapa sejarah menyatakan bahwa buku ini digunakan oleh beberapa raja-raja serta para Menteri dalam berbagai tujuan dan sifat seperti Richelieu, Christina dari Swedia, Frederick dari Prusia, Bismarck dan Clemenceau.⁶⁰

Dalam buku *The Prince*, pada bab 17 sampai 20 khususnya berisi nasehat Machiavelli pada para penguasa bagaimana bersikap kepada rakyat dan diplomasi politik terhadap raja-raja. Baginya, menumbuhkan rasa cinta rakyat dan ketakutan sangat penting. Namun apabila tidak bisa keduanya, ketakutan rakyat lebih utama ketimbang rasa cinta atau kepercayaan rakyat.⁶¹ Penguasa tidak harus selalu berpedoman pada keutamaan dan kebaikan, namun lebih baik berlindung pada keburukan apabila itu dapat menumbuhkan kekuatan pada penguasa.⁶²

“...Dan lagi, dia tidak perlu membuat dirinya khawatir dalam menanggung celaan untuk kejahatan-kejahatan yang tanpanya negara hanya dapat diselamatkan dengan penderitaan, karena jika semuanya dipertimbangkan dengan hati-hati, akan ditemukan sesuatu yang terlihat seperti kebajikan, jika diikuti, akan menjadi kehancurannya; sementara sesuatu yang lain, yang terlihat seperti kejahatan, namun diikuti membawa dia keamanan dan kemakmuran..”

Bagi Machiavelli hati manusia sering berubah-ubah, maka dari itu dari pada menumbuhkan citra yang baik dari masyarakat lebih baik melakukan memperkuat diri, karena

⁵⁹ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Translated and ed. Thomas G Bergin, (New York: Appleton century crofts inc, 1947),Hal xi.

⁶⁰ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Terjemah oleh Natalia Triaji, , Cet I, (Ecosystem Publishing: Surabaya, 2018),Hal 2.

⁶¹ Nicollo Machiavelli, *The Prince*, trans: W. K. Marriott, The Electronic Classic Series, (Pensylvania University, 2001),Hal 66.

⁶² Nicollo Machiavelli, *The Prince*, trans: W. K. Marriott, The Electronic Classic Series, (Pensylvania University, 2001),Hal 72-73.

apabila konsisten pada kekuatan akan mempertahankan kekuasaannya.⁶³

Dalam diplomasi pangeran harus mengutamakan muslihat seperti singa dan rubah. Singa sebagai raja hutan memiliki kekuatan dan kebusan sehingga binatang lainnya tunduk padanya. Sedangkan rubah yang cerdik dan muslihatnya yang dapat melindungi dirinya dari para pemburu. Dua hal ini yang ditekankan Machiavelli dalam diplomasi penguasa terhadap raja-raja. Dunia ini seperti hutan liar dan manusia di dalamnya. Penguasa harus bertingkah seperti baik apabila menghadapi raja lain, walapun aslinya tidak baik atau biasa dengan istilah serigala berbulu domba. Karena baginya raja-raja lainpun belum tentu baik dan tidak berkhianat. Untuk itu penguasa harus bermuslihat seperti rubah dalam hal ini. Namun, apabila cara tersebut tidak berhasil barulah penguasa bertindak bus seperti singa untuk mencapai tujuannya.⁶⁴

Machiavelli menjelaskan cara penguasa yang mencapai kekuasaan dengan kekejaman. Tindakan jahat yang dilakukan penguasa pun dapat dimaafkan oleh rakyat asal penguasa mencapai kesuksesan. Kekejaman apabila dimanfaatkan dengan benar akan menjadi sarana kestabilan kekuasaan mutlak bagi penguasa.

“..kalau raja berperang Bersama pasukannya dan memimpin pasukan yang besar, ia tidak perlu merasa khawatir disebut kejam. Karena tanpa sebutan itu, ia tidak akan pernah dapat mempersatukan dan mengatur pasukan perang.”⁶⁵

Ia menjelaskan melalui perbandingan cerita Aghatocles yang mendapatkan kekuasaannya dengan tidak mematuhi peraturan. Kekuasaan itu ia pertahankan dengan keberanian dan kebijakan yang berbahaya. Machiavelli menjelaskan bahwa keberanian Agathocles dalam mengatasi bahaya dan kebesaran

⁶³ Nicollo Machiavelli, *The Prince*, trans: W. K. Marriott, The Electronic Classic Series, (Pensylvania University, 2001),Hal 75.

⁶⁴ Nicollo Machiavelli, *The Prince*, trans: W. K. Marriott, The Electronic Classic Series, (Pensylvania University, 2001), Hal 84-86.

⁶⁵ Wahyu Kumoroto, *Etika Administrasi Negara*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 62.

jiwanya dalam mendukung dan mengatasi rintangan membuat orang lain tidak memiliki alasan untuk memandang rendah dirinya.⁶⁶

Kemudian seorang panglima tinggi Vitellozzo dari Sicilia yaitu Oliverotto yang berkuasa pada masa Machiavelli. Oliverotto ingin mendapatkan dan menunduki Fermo dengan bantuan orang yang menyukai dan paman yang mengasuh dan menjadi gurunya yaitu Giovanni Fogliani. Namun ia malah mengkhianati Giovanni dan membunuhnya dengan cara yang licik melalui tantara yang mengepungnya. Setelah itu ia menaiki kuda dan mengepung hakim kepala sehingga warga Fermo takut dan terpaksa tunduk padanya. Kemudian mereka membentuk pemerintahan yang menjadikan Oliverto sebagai raja atau penguasa.⁶⁷

Meskipun Oliverotto dan Agathocles mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang kejam dan pengkhianatan, namun mereka bisa hidup dengan aman dan damai di negara mereka selama bertahun-tahun. Dengan ini Machiavelli mempercayai bahwa semua ini berkat kekejaman yang dimanfaatkan dengan baik. Kekejaman yang baik baginya adalah kekejaman yang hanya dilakukan satu kali. Juga penguasa harus menenangkan masyarakat dengan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka.⁶⁸ Dengan cara inilah masyarakat akan memihak kepada penguasa.

Dari paparan diatas, dapat di simpulkan bahwa teori kekuasaan yang ditawarkan oleh Machiavelli pertama, bahwa kekuasaan haruslah diperoleh, digunakan dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri. Bahwa kebijakan, agama, moral hanya sebagai alat untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan. Dengan kata lain Machiavelli memisahkan antara moral dan kekuasaan. Dalam bukunya *The Prince* Machiavelli memberikan pemahaman dan gambaran

⁶⁶ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Terjemah oleh Natalia Triaji, , Cet I, (Ecosystem Publishing: Surabaya, 2018), Hal 62

⁶⁷ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Translated and ed. Thomas G Bergin, Hal 18-19.

⁶⁸ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Terjemah oleh Natalia Triaji, , Cet I, (Ecosystem Publishing: Surabaya, 2018), Hal 64-65.

mengenai kekuasaan, inti dari setiap persoalan dan kekuasaan itu adalah bagaimana menjaga kekuasaan agar tetap stabil dan lentari. Seorang penguasa bukanlah pengemban keutaman-keutamaan moral. Apapun dapat dilakukan penguasa untuk mempertahankan kekuasaan tanpa mengindahkan norma-norma dan moral. Machiavelli tidak menafikan moral dan agama secara keseluruhan, hanya saja baginya moral dan agama tidak terlalu memberi efek positif pada kekuasaan.

Kedua, seorang penguasa harus memiliki watak watak seperti keberanian, kekejaman, kekuatan dan kedisiplinan. Seorang penguasa harus berani mengambil keputusan dan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Perbuatan tidak baikpun apabila dilakukan untuk kebaikan negara maka itu menjadi baik. Penguasa harus kejam dan ditakuti untuk membuat rakyat mapun raja-raja segan kepadanya. Bagi Machiavelli kekejaman atau kekerasan dapat menstabilkan peraturan dan menghindarkan dari kekacauan. Mungkin ini terkesan tidak baik, namun bagi Machiavelli pada dasarnya manusia sendiri juga tidak baik. Apabila kita berfokus pada kecintaan rakyat dan kerelaan rakyat, hal ini akan membuat penguasa terlihat lemah.

Ketiga, dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaan, penguasa dianjurkan untuk melihat sejarah. Bagaimana para penguasa sebelumnya dalam menjalankan kekuasaannya. Apabila itu baik, tidak apa seorang penguasa mencontoh kesuksesan penguasa terdahulunya.

C. Konsep moral dan kekuasaan

1. Etika dan moral

a. Etika

Etika berasal dari Bahasa Yunani *ethos*, yang artinya kebiasaan, watak, kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. *Ethos* sendiri juga dapat diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang terbiasa atau

kecenderungan sifat yang melekat pada diri individu karena dilakukan secara berulang-ulang.

William Klaas Frankena seorang filsuf moral menyatakan bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis (*philosophical judgements*).⁶⁹ Sebagai salah satu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas, persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya. Sementara itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa itu baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁷⁰

Bertens mengartikan etika dapat dilihat dengan dua hal pertama, etika sebagai suatu yang praktis. Etika sebagai suatu yang praktis menunjukkan apa yang harus dilakukan manusia dan berkaitan dengan tingkah laku manusia. Etika sebagai praktis adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi manusia. Etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas. Kedua adalah etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Maksudnya kita tidak melakukan sesuatu yang bersifat moral, melainkan manusia memikirkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan kata lain etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik dan buruknya perilaku moral.⁷¹

Etika membahas kenyataan bahwa manusia adalah makhluk bermoral. Etika diartikan sebagai wacana refleksi filosofis tentang moral. Dalam refleksinya terhadap moral, etika tidak membatasi tindakan factual atau etika bersifat normative. Maksudnya Etika diartikan sebagai suatu cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari baik dan buruk bagi manusia yang dianggap sebagai nilai relatif. Ilmu-ilmu sosial dapat juga

⁶⁹ William K. Frankena, *Ethics*, (New Delhi: Prentice-Hall, 1982), Hal 4-11.

⁷⁰ Lihat di KBBI VI.1 Offline

⁷¹ K. Bertens, *Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), Hal 162-163.

membahas nilai-nilai moral, tetapi dalam perspektif empiris saja, bukan dalam konteks normatif.⁷²

Menurut Frans Magnis Suseno etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia hidup apabila menjadi baik. Ia tidak menyatakan bahwa etika dapat menggantikan agama, namun baginya etika tidak bertentangan dengan agama.

b. Moral

Moral berasal dari Bahasa latin, *mos* (jamak:*mores*) yang artinya cara hidup atau kebiasaan.⁷³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Moral berarti ajaran tentang perbuatan baik dan buruk. moral yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan lain sebagainya, dapat juga diartikan sebagai akhlak, budi pekerti dan Susila. Moral juga berarti kondisi mental yang terungkap dalam bentuk perbuatan.⁷⁴

Dalam buku Kamus Filsafat, moral secara etimologis dalam Bahasa inggris adalah arti kata dari Moral, sedangkan dalam Bahasa Latin yaitu *Moralis* (mos, moralis: adat, kebiasaan), *Mores* (adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup. Secara Terminologi, moral memiliki beberapa pengertian mengenai perbuatan-perbuatan manusia baik dan buruk sesuai dengan kaidah-kaidah yang dianggap benar, kemampuan manusia untuk mengarahkan dirinya maupun orang lain untuk berperilaku sesuai akidah, berkaitan dengan tingkah laku dan hubungan manusia dengan yang lainnya.⁷⁵ Secara epistemologis, moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan

⁷² K. Bertens, keprihatinan Moral: Telaah atas Masalah Etika, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), Hal 57.

⁷³ Wahyu Kumoroto, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 7.

⁷⁴ Lihat di KBBI V1.1 Offline

⁷⁵ Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal 672.

baik sebagai kewajiban atau norma.⁷⁶ Moral dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar atau tidaknya tindakan manusia.

The Liang Gie menyatakan bahwa secara epistemologis etika dan moral bermakna sama. Meskipun keduanya berasal dari persoalan yang berbeda, namun ia meyakini bahwa keduanya merujuk pada persoalan yang sama.⁷⁷ Seiring berjalannya waktu, pengertian etika dan moral dalam epistemologi mengalami pergeseran arti yang kemudian membedakannya. Aristoteles menjelaskan moral dengan istilah dalam Bahasa Yunani “*ethe*” yang berarti baik dan buruknya suatu sifat. Dalam Bahasa Latin, Bahasa Yunani “*ethikos*” diterjemahkan menjadi “*mores*” yang berarti kebiasaan. Dalam buku Aristoteles “*Ethique a Nicomaque*” istilah ini berubah arti, karena selain kata “*ethos*” yang berarti “*kualitas atau sifat*” digunakan juga istilah “*ethos*” yang berarti kebiasaan. “*ethos*” berarti suatu cara berfikir, cara bertindak, tingkah laku manusia terhadap kelompok. Istilah ini sesuai dengan Bahasa Latin “*moralis*” (*mos, moralis: adat, kebiasaan*).⁷⁸

Moral dan moralitas mengandung pengertian yang sama. Moralitas secara Bahasa juga berasal dari kata *mos* Bahasa Latin (jamak, *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Kata bermoral mengacu pada bagaimana masyarakat berperilaku. Kata moralitas merupakan kata sifat Latin dari *moralis*, mempunyai arti yang sama dengan moral, namun moralitas bernada lebih abstrak. Maka dalam pengertiannya lebih ditekankan penggunaan kata moralitas karena sifatnya

⁷⁶ Wahyu Kumoroto, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 9.

⁷⁷ The Liang Gie, *Etika Administrasi Pemerintah*, (Jakarta: Karunia Jakarta Universitas terbuka, 1993), Hal 19.

⁷⁸ Dr. Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Cet. 1, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), Hal 186.

yang abstrak. Moralitas adalah sifat atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.⁷⁹

Moralitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh manusia melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip moral dan etika. Moralitas berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam hati nurani manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat moralitas manusia diantaranya adalah latar belakang Pendidikan, budaya, pengalaman dan karakter individu. Kita tidak bisa mengatakan individu memiliki moralitas atau tidak, melainkan tingkatan moralitas seseorang rendah atau tinggi. Karena sejatinya dalam diri manusia terdapat dorongan untuk mencari kebenaran atau kebaikan. Hanya saja yang membedakan adalah kuat atau tidak dorongan tersebut.⁸⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa moral merupakan daya dorong internal dalam diri atau hati nurani manusia untuk mengarah pada perbuatan baik dan menghindari perbuatan tidak baik.

Menurut William Klaas Frankena, Moralitas merupakan salah satu instrument kemasyarakatan, apabila suatu kelompok sosial menghendaki adanya aturan atau tuntunan atas tindakan atau perilaku itu disebut bermoral. Oleh karenanya moral akan terlihat seperti hukum dan aturan dalam masyarakat. Namun moral memiliki pertimbangan-pertimbangan lebih tinggi terhadap “kebenaran” dan keharusan ketimbang aturan. Moralitas juga bisa dibedakan dengan hukum karena moral tidak dapat ditimbulkan atau diubah melalui tindakan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sanksi-sanksi yang diterapkan pada moralitas tidak seperti norma hukum yang berkaitan dengan paksaan fisik,

⁷⁹ Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 1992). Hal 8.

⁸⁰ Wahyu Kumoroto, *Etika Administrasi Negara*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 10.

sanksi-sanksi moral berkaitan dengan internal seperti rasa malu, rasa bersalah dan lain sebagainya.⁸¹

Taqi Mizbah Yazdi mengemukakan pendapatnya tentang moral, bahwasannya subjek moral tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial manusia ataupun kumpulan dari karakter jiwa. Akan tetapi moral mencakup seluruh perilaku dan karakter yang bernilai, baik itu kaitannya dengan hubungan sesama manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan alam sekitar.⁸²

Secara umum moral menyarankan pada pengertian sebagai ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Perilaku bermoral dibutuhkan untuk kehidupan yang aman, damai dan tentram. Karena moral dapat mempengaruhi cara pandang individu dalam melihat suatu masalah dalam kehidupan. Apabila individu mengamalkan nilai-nilai moral, maka Ketika ada suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah moral akan dikatakan tidak bermoral. Sebaliknya, apabila ada perbuatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah moral maka akan dikatakan bermoral. Untuk itu manusia harus memiliki kesadaran moral, terlebih pemimpin atau penguasa. Ketika penguasa atau pemimpin tidak bermoral, tidak akan tercapai tujuan negara sebagai penjamin kebahagiaan dan keamanan hidup masyarakat.

Pengetian moral dapat dipahami dengan mengklarifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Moral sebagai ajaran kesusilaan, berarti moral adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan melakukan hal-hal atau tindakan yang baik dan meninggalkan hal-hal atau perbuatan yang tidak baik.
2. Moral sebagai aturan atau hukum, berarti ketentuan atau standar hukum untuk menilai apakah perbuatan atau karakter nilai seseorang baik atau buruk. dan

⁸¹ Wahyu Kumoroto, *Etika Administrasi Negara*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 9.

⁸² Mizbah Yazdi, *Meniru Tuhan*, diterjemahkan oleh Ammar Fauzi Heriyadi, (Jakarta:Al-Huda, 2006), Hal 223.

berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lain, Tuhan, dirinya sendiri, dan hubungan dengan alam sekitar.

3. Moral sebagai gejala kejiwaan yang timbul dari beberapa bentuk perbuatan seperti berani, jujur, sabar, gairah dan sebagainya.

c. Perbedaan Etika dan Moral

Istilah etika dan moral memiliki makna etimologi yang sama yakni adat atau kebiasaan, perangai, watak. Etika berasal dari Bahasa Yunani “*ethos*” yang artinya adat. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang dapat ditangkap akal pikiran manusia. Sementara moral berasal dari Bahasa Latin “*mores*” yang berarti kebiasaan.⁸³

Murthada Mutahahhari sebagai filsuf islam kontemporer tidak terlalu tegas dan spesifik membedakan antara etika dan moral. ia menyebutkan kata moral dengan kata akhlak. Baginya etika merupakan ilmu Pendidikan tentang tingkah laku manusia, sedangkan disandingkan dengan kata akhlak yang berarti kesucian kemuliaan. Sehingga baginya moral atau akhlak lebih cocok disematkan kepada manusia dan tak pantas disematkan pada hewan.⁸⁴

Perbedaan etika dan moral adalah etika lebih bersifat teori sedangkan moral bersifat praktis. Istilah moralis kemudian secara teknis mengandung makna moral. Moral merupakan wacana normatif dan imperative yang diungkapkan dalam kerangka baik dan buruk, yang diangkap sebagai mutlak kewajiban manusia. Sedangkan etika merupakan wacana normatif tetapi tidak harus imperatif, karena etika biasanya juga hipotesis, yang membahas tentang perdebatan baik dan

⁸³ Syarifah Habib, *Akhlak dan Etika dalam Islam*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. I No. 4, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015), Hal 73.

⁸⁴K. Bertens, *keprihatinan Moral: Telaah atas Masalah Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), Hal 149.

buruk yang dianggap sebagai nilai relatif. Etika dapat dikatakan sebagai seni hidup manusia untuk mengarahkan manusia pada tujuan hidupnya yaitu kebahagiaan dan berujung pada kebajikan.⁸⁵

Moral sendiri diartikan sebagai hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan baik atau sebagai tolak ukur tindakan manusia. Etika sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan atau adaya landasan moral dalam profesi. Sebaliknya, moral lebih mengarah kepada perbuatan seseorang atau individu. Moral lebih menjurus kepada tindakan manusia sebagai manusia.⁸⁶ Dari sini terlihat perbedaan antara moral dan etika sangat dikit dan hubungan keduanya sangat erat.

Paul Ricoeur menjelaskan istilah etika dan moral dalam tradisi filsafat yang berbeda. Istilah “moral” dikaitkan dengan pemikiran filosofis Immanuel Kant yang bersifat deontologis. Moral bersifat imperatif kategoris yaitu sebuah aturan yang berasal dari akal budi yang mengacu pada dirinya sendiri sebagai keharusan. Moral mengacu pada kewajiban, norma, dan prinsip dalam bertindak. Sedangkan dalam etika, ia mengaitkan dengan pemikiran filosofis Aristoteles yang bersifat teleologis, dikaitkan dengan finalitas atau tujuan.⁸⁷

Franz Magnis Suseno dalam bukunya menjelaskan perbedaan etika dan moral. Etika diartikan sebagai sebuah ilmu bukan ajaran, melainkan sebuah falsafah atau pemikiran mendasar dan kritis tentang pandangan dan ajaran moral. Moral mengatakan bagaimana manusia harus hidup, sedangkan etika mengatakan bagaimana manusia dapat

⁸⁵ Dr. Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Cet. 1, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), Hal 187.

⁸⁶ Wahyu Kumoroto, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 9.

⁸⁷ Dr. Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Cet. 1, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), Hal 188

mengambil sikap yang bertanggung jawab atas berbagai ajaran moral.⁸⁸

2. Kekuasaan

Kekuasaan dan moral merupakan instrumen yang memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai tujuan manusia. Keduanya sama-sama mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai tujuannya.⁸⁹ Kekuasaan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, kharisma dan kekuatan fisik. Kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak pada orang lain, agar orang-orang tersebut mau mematuhi apa yang menjadi keinginan kita.⁹⁰

Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau kelompok untuk menyadarkan masyarakat akan keinginannya sendiri dan juga menerapkannya pada sikap masyarakat atau kelompok lain terhadapnya. Kekuasaan memiliki berbagai bentuk dan sumber. Di mana ada interaksi sosial antar individu dan kelompok pastilah di dalamnya ada kekuasaan.⁹¹ Untuk itu kekuasaan tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari.

Thomas Aquines menjelaskan bahwa sejatinya eksistensi negara bersumber dari hukum kodrat manusia, hukum kodrat yang dimaksud adalah hukum moral yang mencerminkan hukum

⁸⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), Hal 14.

⁸⁹ Wahyu Kumoroto, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 9.

⁹⁰ Prof. Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007).

⁹¹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 268-269.

ilahi. Jadi segala sesuatu yang tidak berlandas pada hukum kodrat berarti juga tidak berlandas pada nilai moral. ia menegaskan bahwa hukum kodrat harus menjadi dasar kekuasaan, bukan kekuasaan yang menjadi dasar hukum. Kekuasaan baginya selalu terhubung pada legitimasi etis.⁹² kekuasaan itu sendiri dapat dijalankan apabila mencakup tiga aspek yaitu, legitimasi dijalankan dengan hukum yang berlaku (legalitas), disahkan secara demokratis, dan tidak bertentangan pada prinsip-prinsip moral. dengan demikian legitimasi akan selalu berhubungan dengan nilai-nilai moral.

Seorang filsuf islam, Ibnu kaldun dalam teori politiknya memisahkan kekuasaan dan legitimasi religious. Namun ia tidak menolak sepenuhnya nilai-nilai religious dan moral dalam kekuasaan. Baginya agama dan moralitas merupakan factor penting untuk menuntun manusia dari sifat kebinatangannya. Dalam hubungan antara kekuasaan dan moralitas, agama sebagai unsur *Rabbani* menuntun manusia lebih dekat pada kebaikan dan unsur keadilan⁹³

Machiavelli menyatakan bahwa kekuasaan dan moral harus di pisahkan. Kekuasaan bagianya semata-mata untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan kebaikan moral menurutnya adalah bijak, stabil, serta mampu melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi negara. Walaupun kejam, selama itu untuk kepentingan negara, maka itu dapat dibenarkan. Bagi Machiavelli yang terpenting adalah apapun dilakukan dengan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan. Apapun yang tindakan dan kebijakan penguasa harus didukung.⁹⁴

Jelas Machiavelli sebagai salah satu tokoh renaissance yang memisahkan hal-hal yang bersifat transendental dan metafik

⁹² Franz Magnes Suseni, *Kekuasaan dan Moral*, (Jakarta:Gramedia, 1986),Hal 5.

⁹³A. Rahman Zainudin, *Kekuasaan Negara*, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), Hal 140.

⁹⁴ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Terjemah oleh Natalia Triaji, , Cet I, (Ecosystem Publishing: Surabaya, 2018), Hal 5.

karena dianggap tidak rasional, juga memisahkan antara kekuasaan dan agama. Machiavelli menganggap agama sebagai institusi moral. sebab itu ia sangat apatis terhadap institusi moral yang mengatasi persoalan negara. Ini bertentangan dengan legitimasi rakyat atau masyarakat yang mengutamakan kepercayaan dalam kekuasaan dan moral sebagai solusi penguasa untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. menurut Machiavelli yang terpenting dalam kekuasaan adalah kekuatan penguasa dalam mempertahankan kekuasaan. Baginya hakikat negara bukan kehendak rakyat, tapi hakekat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia memberi banyak hak tentang bagaimana penguasa memerintah, tapi iya tidak menjelaskan apa dan siapa yang memberi kontrol moral terhadap raja. Hal inilah menyebabkan pemikiran Machiavelli sering di cap tidak moralis.⁹⁵

⁹⁵ Sri Hatuti Puspita Sari, *Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli Tentang Kekuasaan-Tujuan Negara*, Jurnal Hukum. Vol. 8 No. 18, 2001, Hal 38-40.

BAB III

Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi

A. Riwayat Hidup dan Latar belakang pemikiran

Dalam dunia filsafat islam banyak nama filsuf yang terkenal dari timur kebarat, salah satunya Al-Farabi. Namanya lengkapnya adalah Abin Awzlu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Awzalag bin Turkhan. Al-Farabi lahir di Wasij, distrik Farab sekitar tahun 870 M.⁹⁶

Abu Nasr Muhammad Al-Farabi merupakan salah satu filsuf muslim yang dikategorisasi sebagai fisuf peripatetik bersama dengan filsuf sebelum dia, Al-Kindi, dan sesudahnya yaitu Ibn Sina. Antara tahun 872 M sampai 950 M menjadi masa di mana ia banyak menghabiskan waktunya mempelajari dan menulis karya filsafat.⁹⁷

Al-Farabi lahir dalam keluarga bangsawan. Ayahnya adalah orang Persia asli yang bekerja sebagai panglima perang di pengadilan Turki. Ibunya juga berasal dari Persia, namun untuk pekerjaan tidak jelas apa profesi ibunya. Karena berasal dari keluarga terhormat, pendidikan Al-Farabi terjamin. Sehingga ia tumbuh dengan mencintai ilmu pendidikan. Hingga akhir hayatnya, ia memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan melalui karya-karya seperti buku dan berbagai pemikiran.⁹⁸

Al-Farabi hidup tidak jauh dari masa hidup Al-Kindi. Pada masa kehidupan Al-Farabi, budaya penerjemahan dan pengkajian pemikiran filsafat yunani masih subur. Ia juga mempelajari filsafat yunani serta ilmu agama. Dalam pengalaman intelektualnya, Al-farabi muda terlebih dahulu

⁹⁶ Yamani, *Filsafat Politik Islam : Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung : Mizan, 2002), hal. 51

⁹⁷ Yamani, *Filsafat Politik Islam : Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung : Mizan, 2002), hal. 51

⁹⁸ Iqbal Muhammad dan Amin Husein N, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 5.

ditempa dengan ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, hadis, tata bahasa arab.⁹⁹

Pada tahun 910-920 M, pada usia 50 tahun, ia pergi ke Bagdad untuk mempelajari logika dan filsafat Aristoteles di bawah bimbingan Yuhanna Ibn Hailan dan Abu Bisyr Mattius Ibn Yunus. Saat itu, Bagdad merupakan pusat intelektual sehingga ia bisa bertemu dengan para ilmuwan. Beberapa karya filosof Yunani yang ia pelajari dari kedua profesor tersebut mampu menerjemahkan bahasa Yunani ini ke dalam bahasa Arab, seperti *Analitica Posteriora*, *Politik Aristoteles* dan *Republik Plato*, yang terakhir membentuk ide-idenya menjadi politik.¹⁰⁰ Dalam kisahnya, Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa Al-Farabi sangat memahami pemikiran filosofis Aristoteles. Ibnu Sina membaca buku metafisika Aristoteles sebanyak 40 kali, bahkan ia sampai menghafal buku itu. Meskipun ia hafal buku itu, namun ia tidak mengerti, hingga ia membaca buku Al-Farabi berjudul "*Tahqiq ghardhi Aristotalis fi Kitabi ma ba'da al-Thabi'ah*" yang menjelaskan maksud dan tujuan metafisika Aristoteles.

“Adalah Abu Nasr Al-Farabi, ia memiliki pemikiran yang sangat tinggi. Dan tidak bisa disama-ratakan pada skala yang sama dengan yang lainnya, ia adalah pendahulu kita yang luar biasa.”¹⁰¹

Ia mendapatkan pemahaman tentang metafisika Aristoteles lewat buku Al-Farabi *Tahqiq ghardhi Aristotalis fi Kitabi ma ba'da al-Thabi'ah*. Kemudian ia mendapat gelar Guru Kedua “*Mu'alim Tsani*” atas pemahamannya yang mendalam

⁹⁹Hermawan Heris, *Filsafat Islam*, (Bandung : CV Insan Mandiri, 2011), hal.

¹⁰⁰ Sudarsono, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 31

¹⁰¹ Ibnu Sina, Al-Kiya, diambil dari terjemah Gutas, Avicenna, 64. Dikutip dari Yahya Michot, *Al-Farabi and His Influence on The Early Avicenna : The Evidence From The Kitabal-Mabda' wal Ma'ad*, (Ankara, Elis Yayinlari, 2005), 1.

atas falsafah Aristoteles yang mendapat gelar Guru Pertama “*Mu'allim awwal*”.¹⁰²

Kondisi politik tempat ia lahir mempengaruhi pola pemikiran Al-Farabi. Antara tahun 870-892 M, bertepatan dengan situasi politik dinasti Abbasiyah yang tidak stabil, tepatnya di bawah Khalifah Al-Muti', terjadi berbagai konflik politik dan pergantian kepemimpinan yang tidak efektif. Banyak pemberontakan terhadap pemerintah Al-Muti dilakukan dengan motif keagamaan, perebutan kekayaan. Agama dijadikan alat untuk bersaing di dunia politik. Di tempat lain terdapat dinasti Samaniyah yang pada saat itu memiliki kondisi politik yang lebih stabil dibandingkan dinasti Abbasiyah.¹⁰³

Di bawah dinasti Samaniyah, kebebasan intelektual dan toleransi berkembang antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Di sisi lain, masyarakat di bawah dinasti Samaniyah, seperti Bukhara, adalah masyarakat multikultural dan multiras. Padahal, di ukhara terdapat perpustakaan yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan sastra.¹⁰⁴

Dengan kondisi sosial politik yang tidak stabil, Al-Farabi setidaknya mengunjungi dua wilayah tempat ia menulis karya politiknya, yaitu Damaskus dan Mesir. Selama tahun 92-93M, Al-Farabi melakukan perjalanan dari Bagdad ke Damaskus untuk melanjutkan tulisan besarnya *Arâ Al-Madinah Al-Fadhilah* sambil diselingi dengan pekerjaan berkebun. Kemudian, pada 98/99M, ia melakukan perjalanan ke Mesir. Di Mesir, Al-Farabi menyelesaikan pekerjaan lain di bidang politik, yaitu *Al-Siyasah Al-Madaniah*.¹⁰⁵

Dari segi pemikiran politik, Al-Farabi dikenal memadukan pemikiran Plato dan Aristoteles, yang merupakan

¹⁰² Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), Hal. 27.

¹⁰³ Suryadi Dedi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), Hal.83

¹⁰⁴ Yamani, *Filsafat Politik Islam : Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Hal. 54

¹⁰⁵ A. Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), Hal. 126

kebiasaan yang dipraktikkan oleh Plotinus, sehingga gaya pemikiran filosofis Al-Farabi juga bergaya neoplatonik. Plato muncul lebih awal dari Aristoteles, tetapi pengaruh Aristoteles lebih instruktif bagi Al-Farabi. Meskipun demikian, Plato masih memainkan peran penting dalam beberapa buku Al-Farabi. Mengenai ilmu politik, Al-Farabi sangat memahami Plato, apalagi Al-Farabi juga mengikuti doktrin politik Plato dari karya *Republic* dan *Lavas*. Al-Farabi bahkan menganggap Plato sebagai imam para filosof. Salah satunya adalah karakteristik seorang pemimpin, Plato dan Farabi berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki kapasitas untuk berpikir benar. Al-Farabi juga mencatat bahwa filsuf raja Plato mencerminkan tradisi nabi Ibrahim dan hukum.¹⁰⁶

Model pemimpin ideal yang mereka tawarkan tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, penerapan filsafat politik mereka menuntut setiap pemimpin untuk menjadi seorang filosof. Dalam arti, seorang filsuf adalah seseorang yang dapat memimpin masyarakat dan menjadi panutannya.¹⁰⁷ Republik Platon adalah karya epistemologis, yang juga terkait dengan filsafat sosial, filsafat jiwa, dan filsafat politik.¹⁰⁸

Karya-karya Al-Farabi meliputi bidang metafisika, kosmologi, logika, jiwa, agama dan politik. Pada konteks pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik, setidaknya adha 5 karyanya yang menggambarkan pemikiran politik dan agama dalam pandangan Al-Farabi yaitu, *Arâ Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, *Siyasah Al-Madaniah*, *Tahsil al-sa'âdah*, *Ihsa Al-Ulüm*, *Millah wa Nushus Ikhra*.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Three Muslim Sages*, (New York: Caravan, 1997), Hal 15.

¹⁰⁷ Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta:serambi, 2001), Hal 133.

¹⁰⁸ Donald Palmer, *Looking at Philosophy*,(New York: Me Graw Hill, 2001), Hal 65.

¹⁰⁹ Seyyed Hossein Nasr, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam*, Hal. 33

Dalam teori *Al-Madhinah* Al-Fadhilah pertama kali ditulias oleh Al-Farabi di Baghdad, dia membawa manuskrip yang belum selesai hingga ke Damaskus. Hingga pada tahun 942 M kitab ini selesai di Damaskus.¹¹⁰ Al-Farabi menggunakan istilah *madinah*. Dalam bahasa arab, kata *madinah* memiliki akar kata *maddana*. Kata *Madinah* yang dulunya merujuk pada suatu benteng yang dibangun di suatu daratan. Makna *madinah* tersebut lebi dekat dengan makna suatu pemukiman. Namun secara terminology, hal itu digunakan Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah untuk menciptakan suatu daerah di mana masyarakatnya hidup secara tertib, taat terhadap hukum dan peradaban. Oleh karena itu, kata *madinah* juga dapat diartikan sebagai suatu daerah dengan peradaban dimana terdapat hubungan sosial antar manusia.¹¹¹

Kata *madinah* dekat maknanya dengan *polis* dalam bahasa Yunani, *Polis* berarti benteng atau kastil. Namun, *polis* juga bisa berarti tempat tinggal sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan tatanan sosial. Jika makna kata *polis* dimaknai sebagai suatu pemukiman, itu lebih dekat dengan makna kota. Namun jika menggunakan makna kedua, dekat maknanya dengan negara-kota, yaitu suatu kota yang memiliki penguasa dan pengelolaan wilayahnya. Begitu juga kata *madinah* jika dipahami sebagai suatu wilayah pemukiman yang memiliki batas wilayah, maka dalam bahasa Indonesia lebih dekat dengan kata kota pada zaman ini yang maknanya adalah suatu wilayah tempat tinggal sekelompok manusia.¹¹²

Sedangkan kata negara memiliki pergeseran makna sesuai dengan konsep negara tersebut. Kata negara berasal dari bahasa Yunani, *status* yang artinya suatu keadaan tetap dan tegak. Kata *status* juga dirtikan dengan system dan fungsi dari

¹¹⁰Yamani, *Filsafat Politik Islam : Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Hal 56.

¹¹¹Muhammad Husain Mahasinah, *Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Putaka Al-Kautsar, 2016), hal. 16-17

¹¹²Martin Surjaya, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik : Dari Praasejarah Hingga Abad Ke-4 M*, (Tangerang : CV Marjin Kiri, 2016), hal. 47-48

seluruh organ yang tersusun yang menempati suatu wilayah yang memilih territorial. Kemudian, oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya *II Principe* menggunakan kata *state*, sebagai turunan dari kata *status*, yang artinya negara kota. Karena pada saat itu, Italia terbagi menjadi negara-negara kota.¹¹³

Istilah negara bergantung juga pada definisi negara. Menurut Prof. Nasroen, sulit menemukan definisi yang universal karena negara memiliki aspek sejarah, ekonomi, sosial, filosofis yang berbeda. Sehingga, masing-masing definisi tergantung juga pada pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pemikir.¹¹⁴

Menurut Rudolf Kranenburg, yang dikutip oleh Agus Salim, negara ialah suatu ikatan hubungan antara suatu kelompok atau golongan tertentu yang mendiami suatu wilayah dengan memiliki penguasa dengan memerintah untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dua unsur penting dalam membicarakan negara yaitu penguasa atau pemimpin dan masyarakat.¹¹⁵

Negara dalam makna tersebut memiliki makna yang sama dengan *madinah* yaitu sama-sama berarti adanya hubungan antara masyarakat untuk menepati suatu tujuan. Ketika antar kelompok membangun suatu tujuan bersama, muncullah suatu peradaban. Sehingga, tak jarang ada yang menggunakan kata negara dalam mengartikan kata *madinah*.

Al-Farabi dalam buku *Ara ahl al-madiyah al-fadhilah*, menjeleaskan kedua unsur penting tersebut yang sama-sama menjadi perhatian dalam pembahasan negara. Menurutnya, *madinah* adalah sekumpulan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang yang saling bersepakat untuk mencapai suatu kebahagiaan. *Madinah* memiliki territorial sehingga ada *madinah* yang besar dan kecil. Kebahagiaan tersebut dapat

¹¹³Sugianto, *Ilmu Negara : Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2018), hal. 1-3

¹¹⁴Sugianto, *Ilmu Negara : Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, hal. 6

¹¹⁵Agus Salim Andi, *Ilmu Negara*, (Makassar : Kretakupa Print, 2019), hal. 48

dicapai tergantung pada gagasan dan prinsip yang disadari dan diterapkan oleh masyarakat dan pemimpinya. Untuk itu, Al-Farabi menyusun suatu konsep bagaimana kondisi masyarakat dan pemimpin yang ideal sehingga dapat tercapainya kebahagiaan yang sebenarnya dalam suatu *madinah*. Hal itu juga menjadi poin penting yang dibahas oleh Al-Farabi dalam kitabnya *Arâ Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*. Poin pembahasan tersebut merupakan unsur universal yang berlaku bagi setiap pembahasan mengenai negara. Dengan begitu, bisa dikatakan juga bahwa Al-Farabi membahas negara.¹¹⁶

Al-Farabi tidak membahas secara langsung bagaimana sistem pemerintahan yang harus dianut oleh negara. Sebagian orang berpiknik bahwa pembahasan negara berarti membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Namun, perlu dipahami bahwa kecendrungan pemikiran politik pada sebelum abad pertengahan hingga abad pertengahan itu bersifat *authoritarian*, yaitu menekankan pembahasan mengenai *authority* (wewenang), kepemimpinan. Pada kecendrungan itu juga, para pemikir filsafat politik membahas mengenai masyarakat.¹¹⁷ Perlu digaris bawahi juga bahwa pada karya *Arâ Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, Al-Farabi membahas filsafat politik, sehingga bangunan pemikirannya tentang negara berdasarkan pada filsafat teoritis seputar metafisika, jiwa, dan kebahagiaan sebelum menjelaskan filsafat praktis yaitu politik. Dengan itu juga, Al-Farabi memandang negara dengan pendekatan filosofis.¹¹⁸

Dalam filsafat politiknya pada kitab *Arâ Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, Al-Farabi mula-mula membahas tentang *maujud awwal* yaitu sebab pertama dari seluruh keberadaan. Namun,

¹¹⁶Humaidi, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi : Pendasaran Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, dan Agama*, hal. 104

¹¹⁷Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, (Bandung : Mizan, 2006), hal. 215

¹¹⁸Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, hal. 209-210

keberadaan *maujud awwal* bukanlah bersifat individual, melainkan tunggal. Yang kemudian itu disebut Tuhan.¹¹⁹

Dengan pengetahuan-Nya, muncullah akal hingga akal kesepuluh (*aql fa'al*). Pada hierarki akal, yang berada pada hierarki lebih tinggi mengendalikan akal yang hierarkinya lebih rendah. Setelah terpancarkannya cahaya melalui akal, muncullah alam semesta. Alam semesta memiliki mekanisme yang teratur. Alam juga merupakan cerminan dari Tuhan, begitu juga manusia yang disebut dengan '*alam shagir*'. Manusia juga memiliki organisme yang teratur. Sebagai cerminan dari Tuhan, baik alam dan manusia tetap terhubung dengan tingkatan *maujud* (akal) hingga Tuhan. Sehingga, jika alam dapat dibahas dengan pemahaman tentang metafisika, maka dalam pembahasan manusia juga dapat dicoba dengan bangunan metafisika. Dengan demikian, negara juga tersusun dari organisme yang teratur yang mana harus tersusun dengan sempurna agar terbentuknya suatu negara yang ideal.

B. Filasafat Politik Al-Farabi

Gejolak pemikiran politik berkembang bukan hanya dikalangan filsuf barat, dikalangan filsuf islam juga banyak yang mengemukakan ketertarikannya dengan filsafat politik. Filsuf islam yang mengemukakan pemikirannya tentang politik salah satunya adalah Al-Farabi. Al-Farabi. Pengaruh filsafat Yunani, dalam hal ini Plato dan Aristoteles sangat kental dalam pemikiran politik Al-Farabi.

Plato menghendaki adanya Kerjasama antar manusia dalam memenuhi kebutuhan penting manusia. Kesatuan mereka ini kemudian disebut masyarakat dan masyarakat itu adalah negara.¹²⁰ Plato berpendapat bahwa negara terbentuk dari

¹¹⁹Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, '*Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*', hal. 7

¹²⁰ Kabul Budiyo, Teori dan Filsafat Ilmu Politik, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 84.

berbagai perbedaan jiwa-jiwa manusia. Masyarakat yang adil ialah masyarakat yang harmonis. Tipe ideal masyarakat tersebut disebut sempurna atau ideal apabila masyarakat diadakan dari pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah kecil manusia-manusia terbaik, yang memerintah negara berdasarkan motif keadilan.¹²¹

Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah gabungan dari keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. kebahagiaan negara akan mempengaruhi kebahagiaan individu, sehingga apabila manusia ingin mendapatkan kebahagiaan maka harus bernegara. Karena manusia saling membutuhkan satu sama lain.¹²² Pemikiran kedua filsuf ini yang kemudian mempengaruhi pemikiran Al-Farabi, sehingga muncul karya politik Al-Farabi yang berjudul *al-Madinah al-Fadhilah*.¹²³

Dalam *Ara*, Al-Farabi memulai pembahasan filsafat politiknya dengan membahas manusia dan kebutuhannya untuk berasosiasi. Kebutuhan manusia berasosiasi disebabkan karena manusia tidak dapat mencapai kebahagiaan bagi dirinya sendiri. manusia saling membutuhkan satu sama lain agar segala kebutuhannya terpenuhi.¹²⁴ Simbiosis mutualisme antar manusia terjadi karena mereka saling tukar-menukar kebutuhan, atau saling membutuhkan satu sama lainnya. Hal ini didasari karena sifat-sifat alamiah manusia yang dibawa ketika lahir, tidak mendukung manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹²⁵ apabila sebuah asosiasi belum terbentuk, maka secara sadar manusia akan membutuhkannya.

¹²¹ Pudja Pramana, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), hal, 40.

¹²² Abu Daud Basroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal, 22.

¹²³ Kabul Budiyo, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, hal.84.

¹²⁴ Abu Nasr Al-Farabi, '*Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, bab 15 dalam Richard Walzer, *Al-Farabi on The Perfect State*, (Oxford:Clarendon Press, 1985), Hal 228.

¹²⁵ Charles E. Butterworth, *Al-Farabi, The Political Writings: Selected Aphorism and other text*, (Ithaca and London: Cornel University Press, 2001), Hal 21.

“Setiap individu membutuhkan individu lain untuk memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Sebab ia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.”¹²⁶

kebutuhan manusia akan politik di dasari oleh pencapaian dari politik penting bagi kehidupannya. Seperti makan dan minum yang dilakukan oleh manusia karena membutuhkan dari lahir, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang muncul secara natural. Akan tetapi, setelah manusia menyadari dan terjun ke dalam kegiatan politik, ia akan menemukan bahwa kebutuhannya nyata dan semua manusia menginginkannya. Tujuan tersebut adalah memenuhi kebutuhannya lewat kerjasama dan asosiasi, mencapai kebahagiaan lewat kebaikan dan kesempurnaan.

Dalam bukunya *Ihsa' al-Ulum*, al-Farabi menjelaskan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari ragam cara bertindak, cara hidup, kecakapan etika, kecenderungan, watak-watak, tabiat-tabiat yang menyebabkan manusia bertindak dan cara hidup tersebut. Ilmu politik juga membahas tujuan tindakan-tindakan manusia, bagaimana sebaiknya tindakan tersebut ada pada diri manusia, bagaimana seharusnya mengatur manusia sesuai dengan aturan, dan bagaimana memelihara tujuan tersebut. Ilmu politik juga membahas tujuan-tujuan tindakan dan cara hidup manusia, mana yang mengarah pada kebahagiaan hakiki dan mana yang mengarah pada kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang dapat di peroleh di dunia akhirat, sedngkan kebahagiaan semu seperti kekayaan, kejayaan, kehormatab dan kesenangan. Apabila kebahagiaan semu dijadikan tujuan hidup maka hanya akan berlaku pada kehidupan duniawi.¹²⁷

Hubungan sosial antar manusia tidak selalu berjalan mulus, apabila hubungan sosial tidak teratur maka akan

¹²⁶ Imam Ma'rif, *Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib dan Relevansinya dalam Nilai-nilai Pendidikan Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), Hal 36.

¹²⁷ Al-Farabi, *Ihsa' Al-Ulum*, (Libanon: Centre De Development National, 1991), Hal 38.

menimbulkan kekacauan antar manusia. Sehingga membutuhkan negara sebagai hasil dari kesepakatan bersama dalam membangun suatu ikatan bersama. Negara memiliki struktur pemerintah yang bekerja sesuai fungsinya agar menjadi negara ideal. Apabila ada yang tidak bekerja sebagaimana fungsinya, maka itu akan mempengaruhi negara menjadi tidak ideal.¹²⁸

Pemikiran politik Al-Farabi dalam beberapa buku politiknya berhubungan dengan bentuk-bentuk negara dan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Dalam bukunya *As Siyasat al-Madaniyah*, pada bab empat bukunya tersebut membahas permasalahan-permasalahan seputar masyarakat. Ia menyebutkan bahwa adanya masyarakat karena keinginan untuk saling menolong, untuk mendukung kelangsungan hidup mereka. Dia juga menjelaskan bahwa jenis masyarakat dibagi menjadi dua, masyarakat sempurna dan masyarakat tidak sempurna. Masyarakat sempurna terbagi dalam *Al-Ma'murah*, *al-Ummah*, dan *al-Madinah*. Masyarakat tidak sempurna pada *al-Qoriyah*, *as-Sakah*, *al-Mahalalah*, dan *al-Manzil*. *Al-Madinah* terbagi pada *al-Madinah Fadhilah* atau negara utama dan *al-Madinah ghoyru Fadhilah*.¹²⁹ Pertama, berupa masyarakat kelompok besar, seperti masyarakat kota atau masyarakat yang terdiri dari beberapa bangsa yang Bersatu dan bekerjasama secara internasional. Kedua, masyarakat dalam satu keluarga atau masyarakat yang bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama kebahagiaan. Masyarakat seperti ini disebut oleh Al-Farabi sebagai masyarakat utama.¹³⁰

Pembahasan mengenai susunan masyarakat ini kemudian di tengahi dengan pembahasan kebahagiaan. Dalam bab

¹²⁸ Humaidi, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi : Pendasaran Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, dan Agama*, hal. 106

¹²⁹ Abu Nasr Al-Farabi, *as-Siyasat al-Madaniyah*, (Dar wa Maktabah al-Halal, Versi PDF), Hal 8.

¹³⁰ Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal 82.

selanjutnya, ia menjelaskan tentang ahlak (moral) dan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Selain itu, pembahasan tentang kebahagiaan menjadi fundamental dalam filsafat politik, karena bagi Al-Farabi tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan politis.¹³¹

Dalam kitab *Ara*, ada dua bentuk masyarakat yang hidup di kota Utama dan di kota Bodoh. Kota utama di definisikan sebagai kota yang masyarakatnya memiliki tujuan melalui asosiasi dalam sebuah Kerjasama. Kerjasama bertujuan agar kebahagiaan mutlak dapat diraih, yang tentu saja membutuhkan perantara berbagai macam hal. Dalam kota utama ini, susunan masyarakat bagaikan organ tubuh manusia. Organ yang paling utama adalah jantung yang bertugas untuk mengatur organ-organ lain agar tubuh dapat bergerak selaras. Begitu pula dalam kota, orang-orang yang bertugas sebagai pengatur dan membawahi seluruh lapisan masyarakat.¹³²

Tepat di bawah sang pengatur ini, ada orang-orang yang tingkatannya dekat dengan mereka (dalam hal kedudukan) namun aktifitasnya berdasarkan pada tujuan dan niat dari sang pengatur. Pada urutan selanjutnya, ada orang-orang yang bekerja karena tujuan segala sesuatu berdasarkan tujuan sang pengatur. Hingga pada akhirnya pada tingkatan orang yang melakukan kegiatan berdasarkan tujuan orang lain dan tidak ada orang yang berlaku berdasarkan tujuannya. Orang-orang ini melayani orang-orang yang berada di atasnya tanpa meminta imbalan.¹³³

Sekumpulan manusia yang membentuk ikatan bersama dalam sebuah negara memiliki kemampuan dan kualitas jiwa yang berbeda-beda, berasal dari suku dan budaya yang berbeda juga. Prinsip pembagian kerja itu adalah keadilan. Sehingga,

¹³¹ Abu Nasr Al-Farabi, *as-Siyasat al-Madinyah*, (Dar wa Maktabah al-Halal, Versi PDF), Hal 8.

¹³² Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi tentang Konsep negara ideal*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2018),

¹³³ Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal 232-234.

perlu adanya pembagian kerja berdasarkan kemampuan masing-masing diikuti dengan kerjasama yang teratur. Untuk mengatur dan menjaga keharmonisan kerja sama antara warga negara, diperlukan pemimpin. Pemimpin diibaratkan seperti hati pada tubuh manusia. Sebagaimana organ manusia, pada negara terdapat organ pembantu organ utama (pemimpin).¹³⁴

Konsep pemimpin dalam wacana ilmu pengetahuan di latar belakang oleh ragam cita-cita masyarakat yang tidak dapat di realisasikan tanpa adanya hubungan kerja sama. Hubungan Kerjasama yang terjadi pada struktur sosial dapat terealisasi melalui sebuah arahan yang memberikan perintah untuk membimbing masyarakat menuju tujuan hidupnya di realitas.¹³⁵

Berdasarkan pada kenyataan bahwa pada suatu negara terdapat mekanisme kerja sama antar golongan masyarakat, terdapat peran-peran tertentu, selain ada yang berperan sebagai pemimpin. Pemimpin berada pada kelas pertama, masyarakat yang berada pada kelas kedua membantu kelas pertama. Selanjutnya, yang berada pada kelas ketiga akan membantu kelas kedua, dan seterusnya. Hal itu bukan dianggap sebagai sebuah sikap diskriminasi kebebasan. Karena, Al-Farabi membagi peran dalam mengelola negara berdasarkan kualitas jiwa. Manusia yang memiliki kualitas jiwa tertinggi adalah nabi. Namun, karena nabi sudah tidak ada, maka yang layak mengantikannya adalah filsuf.¹³⁶

Berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pada suatu negara terdapat unsur prinsip dan tujuan yang menjadi dasar terbangunnya suatu negara, yaitu kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan yang hakiki menurut al-Farabi tidak akan tercapai di dunia, namun baginya melalui politik manusia akan

¹³⁴Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal. 71

¹³⁵ Mulyadi Kartanegara, *Menembus Batas Waktu Panorama Filsafat Islam* (Jakarta:Mizan, 2002),Hal 69-70.

¹³⁶Thohir Luth, *DISkursus Bernegara Dalam Islam: Dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan*, (UB Press : Malang, 2008), hal. 111

mendapatkan kebajikan dan keutamaan di dunia. Tindakan, gaya hidup, dan tujuan mulia harus ada pada setiap manusia secara merata di seluruh kota agar mendapatkan manfaat yang kolektif. Semua itu tidak dapat terwujud tanpa adanya seorang kepemimpinan yang mendorong terwujudnya hal-hal mulia tersebut di setiap negara atau bangsa.

Kebahagiaan yang menjadi tujuan kolektif manusia pada dasarnya bersifat universal, sehingga relasi kolektivitas yang dibangun tidak hanya antar individu, tetapi lebih luas antar polis (negara kota). Ketika Al-Farabi menggambarkan kesamaan agama dan filsafat yang berujung pada kemiripan konsep kepemimpinan agama dan politik, maka yang dimaksud adalah yang tidak berlaku partikular atau melekat pada hubungan antar kolektivitas besar seperti bangsa dan negara. Sejalan dengan Plato, ia menegaskan bahwa penguasa setiap negara harus seorang raja-filosof, dan setiap negara harus membangun karakter filosof sesuai dengan latar belakang sosial agama leluhur agar dapat mewujudkan kesempurnaan eksistensial manusia.¹³⁷ Menurutny manusia tidak akan mencapai kebahagiaan yang sempurna tanpa adanya pemimpin

Kemudian ada dua unsur penting dalam gagasan *Al-Madinah Al-Fadhilah* yaitu pemimpin dan yang di pimpin atau masyarakat. Berdasarkan pada unsur-unsur tersebut, ada negara yang berada pada kondisi ideal atau *Al-Madinah Al-Fadhilah*. Adapun yang bukan negara ideal yaitu *Madinah Fasiqah, Madinah Mubaddilah, Madinah Dallah, Madhinah Jahilah : Madinah Dharuriyyah, Madinah Baddalah, Madinah Al-Khissah wa Al-Siqut, Madinah Al-Karamah, Madinah Al-Taghallub, Madinah Al-Jama'iyah*.¹³⁸

Al-Madinah al-fadhilah (negara utama) adalah suatu kondisi dimana pemimpin dan masyarakatnya berada pada

¹³⁷Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi tentang Konsep negara ideal*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2018), hal 27.

¹³⁸Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal. 81

mekanisme yang teratur dan paling baik dalam kerjasama mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Setiap individu memiliki pemahaman tentang kebahagiaan sejati dan saling bekerja sama dalam kebaikan sehingga, tujuan akhir dari tiap individu (kebahagiaan) tercapai.¹³⁹

Madinah Fasiqah (negara yang rusak) adalah negara yang masyarakat dan pemimpinnya memiliki pengetahuan tentang sebab pertama, Tuhan, kebahagiaan sejati layaknya masyarakat yang ada di negara utama. Tetapi, pengetahuan tersebut tidak diejawantahkan dalam sikap dan tindakan. Justru, masyarakat pada negara yang rusak ini mengutamakan materi dan merasa bahagia dengan kemewahan dunia.¹⁴⁰

Madinah Mubaddilah (negara yang berubah-ubah) adalah negara yang masyarakat dan pemimpinnya memiliki pengetahuan dan orientasi yang sama dengan negara utama yaitu pengetahuan tentang sebab pertama, Tuhan, jiwa, serta tingkatan *maujud* dan kebahagiaan sebagai tujuan yang semestinya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, negara ini berubah dan berbelok dari tujuan awal tersebut. Jadi, tidak ada konsistensi untuk mewujudkan negara utama.¹⁴¹

Madinah Dallah (negara sesat) adalah negara yang masyarakatnya dan pemimpinnya kurang tepat dalam memahami sebab pertama, Tuhan, tingkatan *maujud*, kebahagiaan dan lainnya, kemudian pemimpinnya menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengelabui masyarakatnya. Sedangkan, dibalik itu tindakannya berbeda dari apa yang diucapkannya.¹⁴²

¹³⁹ Thohir Luth, *Diskursus Bernegara Dalam Islam Dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan*, (Malang : UB Press, 2018), hal. 110

¹⁴⁰ Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal. 80

¹⁴¹ Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal. 80

¹⁴² Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal. 80

Madhinah Jahilah (negara bodoh) adalah negara yang pemimpin dan masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan tentang kebahagiaan sejati. Bahkan tidak ada keinginan untuk mengetahui hal tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa kebahagiaan itu seputar hal-hal materi seperti memiliki tubuh yang indah dipandang, harta yang banyak, serta kehormatan atas suatu jabatan.¹⁴³ Negara bodoh, berdasarkan bentuknya, dibagi lagi menjadi 6 macam tingkatan yaitu :

1. *Madinah Dharuriyyah* (negara niscaya) adalah negara yang masyarakat dan pemimpinnya hanya mengejar hal-hal materi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup seperti makan, minnum, pakaian, dan seksual.¹⁴⁴
2. *Madinah Baddalah* (negara jahat) adalah negara yang masyarakat dan pemimpinnya hanya berpikir bahwa yang ada adalah yang materi dan mengejar kekayaan materi dengan bekerja sama karena tujuan hidupnya hanyalah untuk menumpuk kekayaan materi .¹⁴⁵
3. *Madinah Al-Khissah wa Al-Siqut* (negara rendah dan hina) adalah negara yang masyarakat dan pemimpinnya menjadikan kenikmatan materi sebagai tujuan semata dalam kehidupan ini. Mereka berusaha ingin menikmati hal-hal materi seperti makanan, harta, seksualitas.¹⁴⁶
4. *Madinah Al-Karamah* (negara gila kehormatan) adalah negara yang masyarakat dan pemimpinnya mengejar kehormatan, popularitas, dan pujian dengan melalui jabatan, dan aktivitas lainnya.¹⁴⁷

¹⁴³Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, '*Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal.79

¹⁴⁴I.M.N. Al-Jubouri, *History of Islamic Philoshopy : With View of Greek and Early Histori of Islam*, (England : Bright Pen, 2004), hal.253

¹⁴⁵Humaidi, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi : Pendasaran Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, dan Agama*, hal. 108

¹⁴⁶Humaidi, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi : Pendasaran Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, dan Agama*, hal. 108

¹⁴⁷Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, '*Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal.78

5. *Madinah Al-Taghallub* (negara despotik) adalah negara yang masyarakat dan pemimpinnya mengejar kesenangan dunia, kekayaan atas suatu alam, dan kekuasaan dengan cara menjatuhkan wilayah yang memiliki sumber kekayaan materi yang lebih besar dari mereka. Mereka berusaha menghalangi dengan mengalahkan masyarakat yang akan meraih kekayaan materi.¹⁴⁸
6. *Madinah Al-Jama'iyah* (negara demokratis) adalah negara yang pemimpinnya memberikan kebebasan untuk meraih materi. Kemudian, masyarakat pada negara ini akan bertindak berdasarkan hawa nafsu dengan pembenaran kebebasan tanpa harus mempertimbangkan tujuan kehidupan yaitu kebahagiaan sejati.¹⁴⁹

C. Pemimpin Negara Utama Al-Farabi

Menurut Al-Farabi, kepemimpinan adalah suatu keharusan dalam sebuah negara. Karena pemimpin adalah bagian dari kesempurnaan suatu bangsa. Sebuah negara tanpa pemimpin menjadi sebuah negara pasti tidak sempurna.¹⁵⁰

Hal ini sesuai dengan pandangan para filosof Islam lainnya, seperti Ibnu Khaldoun. Keberadaan seorang pemimpin dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan, baik menggunakan argumentasi rasional maupun kecenderungan keagamaan. Menurut Ibn Khaldun, kelompok yang menggunakan argumen rasional mengatakan bahwa orang yang hidup dalam organisasi atau negara besar cenderung tidak setuju dan memutuskan sesuatu untuk organisasi atau negara mereka. Jika masing-masing individu hanya mementingkan pendapat pribadinya, pasti akan menimbulkan kekacauan. Jadi kita

¹⁴⁸I.M.N. Al-Jubouri, *History of Islamic Philoshopy : With View of Greek and Early Histori of Islam*, hal.254

¹⁴⁹Humaidi, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi : Pendasaran Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, dan Agama*, hal. 109

¹⁵⁰Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal. 72

membutuhkan seorang pemimpin dan simbol negara dan pengambil keputusan yang cerdas bagi masyarakat.¹⁵¹

Argumentasi pengurangan konflik dan resolusi konflik interpersonal di atas tidak serta merta diselesaikan oleh pemimpin. Sebab, ada pemimpin yang sesat karena ketidakadilan, kemudian masyarakat terbebani. Untuk alasan ini, penalaran logis tidak cukup untuk membenarkan urgensi pemimpin. Bagi Ibn Khaldoun, argumen agama dapat melengkapi argumen rasional. Menurut argumen agama, tugas seorang kepala adalah bagian dari tugas agama. Agama membutuhkan penerapan kebenaran dan pemberantasan kejahatan. Pemimpin dalam agama dipandang sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang akan menegakkan agama dan menjunjung tinggi kepentingan manusia, baik secara spiritual maupun global. Dengan demikian, keberadaan seorang pemimpin dianggap perlu dalam suatu negara

Al-Farabi menggunakan istilah Imam untuk menyebut kepala negara, meskipun penggunaannya tidak begitu menonjol seperti penggunaan kata kepala negara (ra'îs). Kata Arab imam diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Imam. Dalam bahasa Arab, Imam adalah pemimpin yang maju, memiliki pengikut, apakah dia pemimpin yang baik atau buruk.¹⁵² Bagi Al-Farabi, seorang kepala negara ialah Imam. Pemimpin negara haruslah menjadi seseorang yang selalu berada di depan sebagai simbol dan pemberi keputusan sebagaimana hati yang memberikan instruksi kepada anggota badan untuk bergerak.¹⁵³

Dalam ilmu politik, seorang pemimpin didefinisikan sebagai seseorang yang tugasnya merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan. Pemaknaan pemimpin selalu menggunakan deskripsi pekerjaannya.¹⁵⁴ Namun, hal ini

¹⁵¹Abdurrahman Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 340

¹⁵²Murtadha Mutahhari, *Imamah dan Khilafah*, (Jakarta : CV. Firdaus, 1991), hal. 21

¹⁵³Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu : Sebuah Rekonstruksi Holistik*, (Bandung : Mizan, 2005), hal. 172

¹⁵⁴Suwatno, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), hal. 4

berbeda dengan makna pemimpin dalam pemikiran Al-Farabi yang lebih filosofis.

Pemimpin negara bertugas untuk mengantarkan masyarakat kepada kebahagiaan sejati. Dengan itu, pemimpin harus memiliki kemampuan mendidik, membina, dan mengelola negara agar tujuan negara dapat tercapai. Mencapai kebahagiaan sejati dengan cara bekerjasama memerlukan keutamaan-keutamaan tertentu yang harus dicapai terlebih dahulu oleh masyarakat, seperti keutamaan dalam berpikir dan akhlak. Pemimpin negara utama memiliki tugas untuk dapat membimbing masyarakat pada keutamaan tersebut juga. Keputusan dan arahan dari pemimpin harus berdasarkan pada keutamaan atau kebajikan dalam berpikir dan akhlak juga. Karena untuk memperkenalkan keutamaan dalam berpikir dan akhlak, harus dilakukan oleh orang yang sudah mengenal dan menerapkan hal tersebut.¹⁵⁵

Untuk mencapai keutamaan dalam berpikir dan akhlak yang mulia sebagai cerminan dari Tuhan, hal itu mungkin untuk terjadi karena manusia pada hakikatnya memiliki tingkatan daya berpikir dan jiwa yang terhubung dengan akal-akal yang memungkinkan manusia menerima pengetahuan yang bersumber dari Tuhan.¹⁵⁶

Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia sebagai mikrokosmos adalah bagian dari kosmologi alam semesta. Dalam pemikiran kosmologinya, Al-Farabi menjelaskan bahwa terjadi emanasi dari *maujud awwal* yang berpikir tentang dirinya sebagai wujud pertama kemudian memancarkan wujud kedua yang dikenal sebagai akal pertama/wujud kedua yang bersifat non-materi.¹⁵⁷ Akal pertama memikirkan wujud pertama sehingga muncul akal kedua/wujud ketiga. Akal kedua karena memikirkan dirinya, memancarkan *al-samâ al-ūla* dan akal ketiga/wujud keempat. Akal ketiga/wujud keempat karena

¹⁵⁵ Sudjatmoko, *7 Tokoh Filsafat Dunia*, (Sukoharjo : Penembahan Senopati, 2015), hal. 67

¹⁵⁶ Herbert A. Davidson, *Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect*, (New York : Oxford University Press, 1992), hal. 12

¹⁵⁷ Muhammad Solikhin, *Filsafat Dan Metafisika Dalam Islam : Sebuah Pengalaman Mistik dan Perjalanan Aliran Manunggaling Kawula Gusti*, (Yogyakarta : Narasi, 2008), hal. 173

memikirkan dirinya, memancarkan langit kedua yang berisi *al-kawâkib al-sâbitah*. Akal ketiga karena memikirkan wujud pertama memunculkan akal keempat/wujud kelima. Pada akal keempat terdapat saturnus. Akal keempat memikirkan wujud pertama sehingga memancarkan akal kelima/wujud keenam. Pada akal kelima terdapat yupiter. Kemudian Akal kelima memikirkan wujud pertama sehingga memancarkan akal keenam/ wujud ketujuh. Karena memikirkan dirinya, muncullah mars. Akal keenam memikirkan wujud pertama lalu memancarkan akal ketujuh/wujud kedelapan. Akal ketujuh memikirkan dirinya sehingga memunculkan matahari. Akal ketujuh memancarkan akal kedelapan/wujud kesembilan. Akal kedelapan memikirkan dirinya memunculkan venus. Dari akal kedelapan terpancarkan akal kesembilan dan merkurius. Dari akal kesembilan muncullah akal kesepuluh dan bulan. Melalui akal kesepuluh karena memikirkan dirinya muncullah bumi beserta makhluk yang ada di bumi.¹⁵⁸

Pada hakikatnya, akal-akal tersebut bersifat non-materi dan terhubung dengan jiwa dari tiap substansi yang muncul. Jiwa manusia terhubung dengan akal kesepuluh atau disebut juga *aql fa'al* (akal aktif). *Aql fa'al* di sini berbeda dengan akal dalam artian epistemologi. Pada diri manusia terdapat daya berpikir yang mana menggunakan akal. Pada daya berpikir ini terdapat tiga tingkatan yaitu *aql hayulani* (akal potensial) yang padanya terdapat potensi untuk memilah makna-makna. Kemudian ada *aql bi al-fi'li* (akal aktual) yaitu padanya telah terjadi proses pelepasan makna dari materi dan makna-makna itu memiliki wujud di akal. Ketiga, *aql mustafad* (akal perolehan) yaitu berfungsi untuk berkomunikasi dengan *aql fa'al* dan menerima forma semata dari *aql fa'al* tersebut.¹⁵⁹

Akal memiliki kuasa atas perjalanan manusia dalam menerima pengetahuan dan berhubungan dengan akal kesepuluh. Untuk sampai pada *aql mustafad* sehingga terhubung dengan *aql fa'al*, manusia harus memiliki pengetahuan teoritis, kontemplasi,

¹⁵⁸Silfia Hanani, *Dialog Filsafat Dengan Teologi : Tuhan dan Alam dalam Perbincangan Filosof Ibnu Sina dan Teolog Al-Ghazali*, (Bandung : Tafakur, 2004), hal. 54

¹⁵⁹Muhammad Solikhin, *Filsafat Dan Metafisika Dalam Islam : Sebuah Pengalaman Mistik dan Perjalanan Aliran Manunggaling Kawula Gusti*, hal. 175

kegiatan berpikir yang mendalam, serta kesucain jiwa. Menurut Al-Farabi, manusia yang mampu berkomunikasi dengan *aql fa'al* adalah nabi dan filsuf. Berbeda dengan nabi, para filsuf harus berusaha dalam waktu yang lama untuk mencapai derajat tersebut.¹⁶⁰

Menurut Al-Farabi, seorang pemimpin harus memiliki daya berpikir yang tinggi, posisi pemimpin dalam negara utama hanya layak diduduki oleh seorang filsuf karena sudah tidak ada nabi lagi. Sebagaimana mekanisme organ tubuh manusia yang jika ingin sehat maka tiap bagian harusnya bekerja sesuai pada fungsinya, pada negara juga harus demikian. Ada yang memimpin dan dipimpin baik dalam konteks komunal ataupun individual, yaitu memimpin diri sendiri. Bekerja sama sesuai pada fungsinya bukan berarti ada pengambilan hak dan diskriminasi atas keinginan untuk berekspresi. Melainkan justru pada negara utama, masyarakat memiliki pemahaman yang sama atas kriteria yang layak menjadi pemimpin.¹⁶¹

Dalam suatu negara, tidak mungkin semua manusia yang berada di dalamnya memiliki keutamaan dalam berpikir dan akhlak pada level yang sama. Sehingga, yang memiliki kemampuan atau level tertinggi memiliki kemampuan yang berbeda dalam memimpin dari pada orang lain, dan yang levelnya terbawah akan menjadi yang dipimpin dan cukup sebatas memimpin diri sendiri. Karen itu Al-Farabi membagi 3 tingkatan manusia berdasarkan kemampuannya dalam memimpin yaitu manusia yang layak menjadi pemimpin tertinggi, manusia yang mendekati kriteria pemimpin tertinggi sehingga dia dapat menjadi pemimpin pengganti atau dan subordinat yang mana pada saat yang sama juga dipimpin oleh pemimpin tertinggi, dan yang terakhir adalah mereka yang menjadi yang dipimpin dalam negara.¹⁶²

Selain keutamaan pada daya berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang pemimpin utama, setidaknya memiliki sejumlah sifat yang dengan itu ia menjadi pemimpin

¹⁶⁰I.M.N. Al-Jubouri, *History of Islamic Philosophy : With View of Greek and Early History of Islam*, hal.253

¹⁶¹Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal. 73

¹⁶²Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, hal. 214

tertinggi. Al-Farabi membagi 12 kriteria pemimpin utama yaitu, *pertama*, Memiliki anggota badan yang sehat dan utuh, serta jiwa yang sehat. Jika pemimpin memiliki tubuh yang sakit dan jiwa yang tidak sehat atau kotor, maka pekerjaannya akan menjadi kacau. Pada jiwa yang kotor, urusan yang semestinya ditangani dengan baik bisa saja ditangani dengan buruk. *Kedua*, Memiliki pemahaman dan persepsi yang baik. *Ketiga*, Memiliki ingatan yang baik atas apa yang dilihat, didengar, dan diindra. *Keempat*, Memiliki kepandaian dan kecerdasan yang baik. *Kelima*, Memiliki artikulasi yang baik. *Keenam*, Mencintai ilmu pengetahuan. *Ketujuh*, Mencintai kebenaran dan kejujuran. *Kedelapan*, Tidak gemar terhadap makan dan minum yang berlebihan, kegiatan seksual, dan kesenangan materi lainnya.¹⁶³

Kesembilan, Berjiwa besar. *Kesepuluh*, Memandang rendah harta dunia. *Kesebelas*, Mencintai keadilan dan orang-orang yang berbuat adil. *Keduabelas*, Memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan pekerjaan yang baik.¹⁶⁴

Dengan statusnya sebagai filsuf yang sudah mencapai *aql fa'al* dan memiliki 12 kriteria di atas, membuat sosok pemimpin negara utama adalah manusia yang sempurna. Namun hal itu bukan berarti Al-Farabi menganggap sosok semacam itu mudah ditemui. Untuk itu, ia menjelaskan lebih lanjut bahwa jika kriteria pemimpin yang dijelaskan sebelumnya itu tidak ada atau tidak memimpin, maka dapat memiliki seorang dengan kriteria, *pertama* ia haruslah seorang filsuf. *Kedua*, berilmu dan menjaga syari'at, serta menjelankannya sebagaimana pemimpin negara utama. *Ketiga*, unggul dalam menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan syari'at yang tidak ada pada masa sebelumnya. *Keempat*, memiliki pendapat yang baik dan benar dalam menetapkan suatu persoalan atau uisu kontemporer pada zamannya dan memperkirakan masalah pada masa yang akan datang. *Kelima*, memiliki keunggulan dalam memberi petunjuk dalam penetapan

¹⁶³Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal. 75

¹⁶⁴Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal.76

maupun pelaksanaan syari'at. *Keenam*, memiliki sehat dan kuat secara fisik sehingga dapat memimpin peperangan.¹⁶⁵

Dalam karyanya *Fusul Mumtaza'ah*, al-Farabi menggunakan dokter sebagai analogi pemerintah. Agar penguasa tidak menganggap al-Farabi sebagai serigala yang siap memangsa kawanannya, ia melukiaskan kesamaan profesi penguasa dengan profesi yang dianggap kebanyakan orang sebagai pengabdian kepada sesama, yaitu dokter. Demikian pula ketika membahas raja dalam kebenaran (*the King in truth*), ia menghindari pemaparan yang menjelaskan bahwa aturan dibuat untuk menunjukkan “kehormatan” (*al-karamah*) dan “dominasi” (*al-ghalabah*), kekayaan, atau kesenangan. Ia menceritakan sosok antonim sosok yang mencari kekayaan untuk negerinya maupun dirinya sendiri dengan mengorbankan rakyat, lalu menyimpulkan bahwa yang terbuurk adalah penguasa yang mencari tujuan-tujuan tersebut dan diperalat tujuan tersebut. Al-Farabi menjelaskan bahwa penguasa sejati tidak membutuhkan atribut-atribut kepatuhan, kemewahan, atau dominasi dengan penaklukan, brutalitas, terror, dan ketakutan untuk menunjukkan kekuasaannya. Baginya dominasi tidak boleh menjadi tujuan dan ia tidak menganjurkan segala bentuk penaklukan.¹⁶⁶

Berbeda dengan Al-Farabi, menurut Machiavelli seorang pemimpin adalah seseorang yang harus ditakuti oleh rakyat. seorang pemimpin harus mengabaikan pertimbangan moral sepenuhnya dan mengandalkan segala sesuatunya pada kekuatan akal, dan mungkin juga kelicikan. Dalam mempertahankan kekuasaannya, pemimpin membutuhkan cara kekerasan, keluwesan, hingga tipu daya bila perlu. Satu-satunya yang

¹⁶⁵Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal. 77

¹⁶⁶ Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi tentang Konsep negara ideal*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2018),

dilakukan pemimpin adalah cara untuk mempeertahankan kekuasaannya.¹⁶⁷

Machiavelli menganjurkan pemimpin yang keras sekaligus “licin”, segarang harimau dan secerdik rubah (lembut namun bisa menerkam). Dengan kata lain Machiavelli ingin mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang cerdas dalam bertindak. Machiavelli menyarankan pemimpin untuk melakukan kejahatan dengan baik. Sebagai penegasannya, kejahatan yang dimaksud Machiavelli adalah apabila diperlukan untuk keamanan negara. Kejahatan itu harus dilakukan dengan cepat, tidak boleh diulang terlalu sering dan tidak boleh melakukan kebrutalan dalam kejahatan yang tidak dipikiran terlebih dahulu.

Para pemimpin harus mendapatkan dukungan dari rakyat. karena pemimpin akan sulit menghadapi maslaah apabila tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. ada kalanya pemimpin baru untuk memperkuat kekuasaan melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga akan dibenci rakyatnya. Namun, bagi Machiavelli pemimpin harus menyiapkan strategi agar rakyat dapat melupakan keburukan yang telah dilakukan oleh pemimpin. Karena bagi Machiavelli penguasa tidak perlu mempunyai sifat yang baik, akan tetapi harus terlihat seperti bersifat baik (pencitraan).

Dengan demikian terlihat sangat bertolak belakangan pemikiran politik Machiavelli dan Al-farabi. Al-Farabi menyatakan bahwa dalam kekuasaan, pemimpin harus memiliki beberapa kriteria dalam penjelasan pemimpin idealnya untuk mencapai tujuan Bersama yaitu kebahagiaan seluruh rakyat. sedangkan Machiavelli mengabaikan nilai-nilai moral dan agama dalam kekuasannya. Karena bagi Machiavelli utamanya seorang

pemimpin adalah melakukan segala cara baik ataupun buruk untuk mempertahankan kekuasaannya.

A. Teori Kuasa Machiavelli

Pembahasan tentang kekuasaan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pemikiran Machiavelli mengenai kekuasaan berasal dari sekulerisasi atau pemisahan agama dan politik. Kekuasaan sebagai bagian dari politik, sedangkan agama dihubungkan dengan moral, yang dikenal dengan lahirnya “*Renaissance*”.

Pandangan Machiavelli yang sekuler dan kritis atas moral secara fundamental mempengaruhi pandangannya tentang pemimpin dan negara. Baginya negara adalah sebuah konsep yang bersifat impersonal, negara bukanlah milik pribadi. Machiavelli tidak melihat negara sebagai suatu yang melekat pada diri seseorang. Entitas negara menjadi entitas publik, dimiliki bersama. Berlainan dengan negara, Machiavelli menekankan segi personalitas pada diri pemimpin negara. Sehingga baginya pemimpin hanya dapat berkuasa apabila pemimpin memahami secara tepat tentang pentingnya keterampilan, bakat dan kekuatan yang ia perlukan dalam memimpin.

Menurut Machiavelli, di dalam politik satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah kekuasaan. Dalam meraih tujuan kekuasaan politik segala cara dapat dilakukan oleh pemimpin, seperti berdusta, tipu, muslihat, sumpah-sumpah palsu, penghianatan, menginjak-injak kebenaran, merampas hak orang lain dan sebagainya. Bagi Machiavelli pemimpin bukanlah personifikasi dari keutamaan-keutamaan moral. Karena tujuan utama dari pemimpin adalah mempertahankan kekuasaan dan menjaga wilayah kekuasaannya agar tetap eksis.¹⁶⁸

Kemudian Machiavelli menjelaskan bahwa dalam mempertahankan kekuasaannya, pemimpin mengabaikan pertimbangan moral, sebaliknya pemimpin menggunakan segala cara baik atau buruk sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosial

¹⁶⁸ Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa* (Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2002) xxxii

yang terjadi. Dengan begitu, pemikiran Machiavelli ini meniscayakan kejajaman seorang pemimpin akan melakukan keburukan asal bertujuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat.¹⁶⁹ seperti yang telah di jelaskan di bab sebelumnya, tujuan masyarakat membentuk negara adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kebutuh utama masyarakat adalah mencapai tujuan Bersama yaitu kebahagiaan.

Pemikiran Machiavelli bahwa moral bukan hal yang utama dan pemimpin bisa melakukan perbuatan yang tidak baik karena akan membuat kegagalan bagu pemimpin. Machiavelli menjelaskan bahwa begitu banyak orang yang tidak baik, karena itu perlu bagi pemimpin dalam mempertahankan dirinya untuk belajar bagaimana tidak menjadi baik dan mengamalkannya sesuai dengan kebutuhannya. Pemimpin yang baik memang akan mendapatkan pujian dari masyarakat, namun tidak semua pemimpin dapat melakukannya. Pemimpin juga harus bijak untuk menghadapi orang-orang bermuka dua, cerdas dan beberapa sifat buruk lainnya yang dapat mengancam kekuasaannya. Karena bisa jadi hal yang nampak baik, apabila diikuti akan menuju opada keruntuhan seseorang. Sebaliknya, hal yang nampak tidak baik akan memberikan keamaan dan kesejahteraan lebih besar.

Dalam bukunya *The Prince*, Machiavelli memberikan contoh pemimpin yang baik yaitu Alexander. Alexander dikenal sebagai pemimpin yang baik, sehingga dalam kepemimpinannya ia dikenal sebagai orang yang tidak pernah menghukum mati orang yang melakukan kesalahan tanpa diadili terlebih dahulu. Namun karena kebajikannya ia malah dianggap lemah dan membiarkan dirinya diperintah oleh ibunya. Oleh sebab itu ia mendapat cemoohan dari masyarakatnya dan ia didustai oleh pasukan perang hingga ia terbunuh.¹⁷⁰ Dengan demikian Machiavelli dapat memperkuat argumentasinya bahwa

¹⁶⁹ Frederick Mayer, *A History of Modern Philosophy*, (New York: The University of California, 1951), hal 33-34.

¹⁷⁰ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Translated and ed. Thomas G Bergin, hal 56.

pemimpin tidak perlu berbuat baik dan mengacu pada nilai-nilai moral.

Menurut Machiavelli, dalam kekuasaan tidak ada unsur-unsur moral yang wajib ditaati. Kekeusaan dan moral adalah dua objek yang terpisah dan tidak ada hubungan antar keduanya. Dalam kekuasaan moral tidak berarti apa-apa, yang terpenting adalah bagaimana kekuasaan dapat diperoleh dan dipertahankan. Sehingga segala cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dapat dibenarkan. Apabila pemimpin menggunakan standar moral untuk menjalankan kekuasaannya, maka pemimpin akan berperilaku dengan dua standar. Ketika pemimpin bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemimpin suatu negara, maka tindakannya hanya diatur oleh konsekuensi praktis tanpa terkait dengan pertimbangan moral. Pemisahan kekuasaan dan moral ini akan terlihat ketika negara atau pemimpin sedang menghadapi masalah, di mana keputusan penyelamatan negara lebih utama dari pada mempertimbangkan keadilan atau ketidakadilan. Serta segala pertimbangan yang dilakukan alternatifnya harus mempertimbangkan menyelamatkan kehidupan dan menjaga kebebasan bernegara.

Pemimpin dalam pemikiran Machiavelli harus ditakuti oleh masyarakat. apabila ada dua pilihan pemimpin harus dicintai atau ditakuti, maka harus ditakuti dan dicintai. Namun apabila tidak bisa keduanya, yang lebih utama adalah pemimpin harus ditakuti. Karena cinta akan hilang apabila tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan rakyat, sedangkan ketakutan akan dipelohara oleh hukum yang yidak pernah gagal. Pemimpin harus cerdik untuk membuat masyarakat tidak mencintainya namun juga tidak membencinya. Kekejaman yang tidak manusiawi apabila dibarengi dengan kebaikan-kebaikan lain akan membuat pemimpin selalu dihormati dan ditakuti di mata tentaranya. Sedangkan pemimpin butuh dikawal oleh pasukannya dan memiliki tantara perang yang besa radar terkesan kejam di mata para pemimpin lainnya.

Moral bagi Machiavelli berkaitan dengan apa yang diinginkan manusia, sebagai konsep ideal yang didambakan manusia. Sementara kekuasaan baginya merupakan realitas yang

manusia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kekuasaan memiliki tujuan yang lebih jelas dari pada moral. Dalam kehidupan sehari-hari pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memiliki pemikiran tajam untuk melindungi dirinya dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Untuk itu Machiavelli menyarankan pemimpin untuk seperti singa dan rubah. Singa yang dikenal akan kekuatan serta kekejamannya dan rubah yang dikenal akan kelicikannya.

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa hal yang dipahami atas pemikiran politik Machiavelli. Pertama, bahwa dalam kekuasaan Machiavelli satu-satunya yang harus diperhatikan adalah cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Sehingga segala cara boleh dilakukan oleh pemimpin agar bisa mempertahankan kekuasaannya. Karena pada dasarnya tujuan dari kekuasaan adalah untuk kejayaan pemimpin itu sendiri. kedua, manusia pada dasarnya memiliki sifat tidak baik, sehingga seorang pemimpin yang baik akan gagal. Manusia memiliki beberapa sifat buruk seperti berkhianat, bermuka dua, tidak jujur dan lain sebagainya. Sehingga pemimpin harus ditakuti oleh rakyat dan tantara perangnya agar pemimpin tidak dikhianati.

Ketiga, teori kuasa yang digagas oleh Machiavelli bertolak belakang dengan tujuan terbentuknya negara yaitu menciptakan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Sedangkan di dalam kekuasaan Machiavelli tidak ada hukum timbal balik dalam politik. Karena tujuan kekuasaan bagi Machiavelli semata-mata untuk kejayaan pemimpin, rakyat tidak ikut merasakan. Untuk itu hak dan kewajiban dalam negara juga harus diberikan. Keempat, paham yang dikehendaki Machiavelli dalam kekuasaan yang menghilangkan aspek moral dalam menjalankan pemerintahannya akan berefek buruk untuk orang-orang yang mengikuti pemikirannya. Para pemimpin akan bertindak semena-mena terhadap rakyat dan hukum yang diterapkan.

Al-Farabi yang lahir jauh sebelum masa Machiavelli sudah jelas memiliki pemikiran yang mendalam terkait politik dan kekuasaan. Walaupun tidak secara langsung menyebutkan penyatuan antara moral dan agama dengan kekuasaan, namun

dalam konsep negara utama Al-Farabi dijelaskan Pemimpin negara bertugas untuk mengantarkan masyarakat kepada kebahagiaan sejati. Dengan itu, pemimpin harus memiliki kemampuan mendidik, membina, dan mengelola negara agar tujuan negara dapat tercapai. Mencapai kebahagiaan sejati dengan cara bekerjasama memerlukan keutamaan-keutamaan tertentu yang harus dicapai terlebih dahulu oleh masyarakat, seperti keutamaan dalam berpikir dan bermoral (akhlak). Pemimpin negara utama memiliki tugas untuk dapat membimbing masyarakat pada keutamaan tersebut juga. Keputusan dan arahan dari pemimpin harus berdasarkan pada keutamaan atau kebajikan dalam berpikir dan moral (akhlak) juga. Karena untuk memperkenalkan keutamaan dalam berpikir dan moral (akhlak), harus dilakukan oleh orang yang sudah mengenal dan menerapkan hal tersebut.¹⁷¹

Untuk mencapai keutamaan dalam berpikir dan akhlak yang mulia sebagai cerminan dari Tuhan, hal itu mungkin untuk terjadi karena manusia pada hakikatnya memiliki tingkatan daya berpikir dan jiwa yang terhubung dengan akal-akal yang memungkinkan manusia menerima pengetahuan yang bersumber dari Tuhan. Sehingga pemimpin harus memenuhi syarat-syarat yang al-Farabi jelaskan dalam konsep negara utama.

¹⁷¹Sudjatmoko, *7 Tokoh Filsafat Dunia*, (Sukoharjo :Penembahan Senopati, 2015) hal. 67

BAB IV

RELEVANSI PEMIMPIN IDEAL AL-FARABI ATAS TEORI KUASA MACHIAVELLI

A. Teori Kuasa Machiavelli

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan pemikiran politik antara Machiavelli dan Al-Farabi. Politik kekuasaan yang dibangun Machiavelli adalah bahwa tindakan manusia bertujuan untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik. Tidak semua yang buruk akan berdampak buruk, dengan kata lain Machiavelli ingin mengatakan bahwa cara yang buruk apabila dapat berdampak baik bagi kekuasaan maka itu dapat dibenarkan. Menurutnya, seorang pemimpin harus mengabaikan pertimbangan moral sepenuhnya dan mengandalkan segala sesuatunya atas kekuatan, akal, dan memungkinnya juga dengan kelicikan. Dalam mempertahankan kekuasaan dibutuhkan cara kekerasan, keluwesan, hingga tipu-daya bila perlu. Mungkin hal ini terdengar tidak baik, namun bagi Machiavelli manusia itu sendiri tidak baik. Manusia memiliki kepribadian yang tidak baik dan sering melakukan hal-hal buruk seperti ingkar janji, berbohong, tamak pada kekuasaan, munafik dan lain sebagainya.

Sementara berbeda dengan Machiavelli, Al-Farabi justru berangkat dari pemikiran bahwa manusia pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Namun, tidak semua manusia memiliki kapasitas untuk memperoleh sendiri kebahagiaan tersebut. membutuhkan bimbingan dan arahan manusia yang memiliki level atau tingkatan lebih tinggi untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang Bahagia. Yaitu diantara manusia ini, pemimpinlah yang memiliki daya imajinasi dan kearifan praktis yang kuat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing masyarakat. sehingga pemimpin dalam pandangan Al-Farabi harus memenuhi beberapa kriteria pemimpin sehingga dapat dikatakan sebagai pemimpin ideal.

Selain keutamaan pada daya berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang pemimpin utama, setidaknya memiliki sejumlah sifat yang dengan itu ia menjadi pemimpin tertinggi 12 kriteria pemimpin utama Al-Farabi yaitu, *pertama*, Memiliki anggota badan yang sehat dan utuh, serta jiwa yang sehat. Jika pemimpin memiliki tubuh yang sakit dan jiwa yang tidak sehat atau kotor, maka pekerjaannya akan menjadi kacau. Pada jiwa yang kotor, urusan yang semestinya ditangani dengan baik bisa saja ditangani dengan buruk. *Kedua*, Memiliki pemahaman dan persepsi yang baik. *Ketiga*, Memiliki ingatan yang baik atas apa yang dilihat, didengar, dan diindra. *Keempat*, Memiliki kepandaian dan kecerdasan yang baik. *Kelima*, Memiliki artikulasi yang baik. *Keenam*, Mencintai ilmu pengetahuan. *Ketujuh*, Mencintai kebenaran dan kejujuran. *Kedelapan*, Tidak gemar terhadap makan dan minum yang berlebihan, kegiatan seksual, dan kesenangan materi lainnya. *Kesembilan*, Berjiwa besar. *Kesepuluh*, Memandang rendah harta dunia. *Kesebelas*, Mencintai keadilan dan orang-orang yang berbuat adil. *Keduabelas*, Memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan pekerjaan yang baik.¹⁷²

Penjelasan di atas menggambar pemikiran politik yang digagas oleh kedua filsuf yang berbeda. Maka dari itu untuk meninjau lebih lanjut pemikiran politik Machiavelli dalam teori kekuasaannya dengan menghadirkan Kembali pemikiran politik Al-Farabi dalam konsep pemimpin ideal. Sehingga di sini peneliti menggunakan istilah relevansi sebagai tinjauan filosofis dengan menyandingkan pemikiran politik kedua filsuf tentang politik. Oleh sebab itu, ketika mempertimbangkan argumentasi yang peneliti analisis dengan relevansi pemikiran tokoh, bukan mengkritik atau menolak pandangan Machiavelli, melainkan sebagai tinjauan filosofis sejauh kerangka argumentasi yang diberikan oleh kedua filsuf, memberikan wacana yang epic dalam khazanah intelektual filsafat islam maupun filsafat barat.

¹⁷²Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, hal.75-76.

Maka dari itu peneliti akan memaparkan uraian dan analisis terkait tema serta masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu teori kuasa yang digagas Machiavelli di sandingkan dengan pemikiran Al-Farabi mengenai pemimpin ideal yang dipaparkan dalam konsep negara utamanya.

B. Relevansi Pemimpin Ideal

Pembahasan mengenai kekuasaan sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai pemikiran Machiavelli secara komprehensif. Maka dari situ peneliti akan memaparkan tinjauan filosofis mengenai dua tokoh filsuf tersebut secara kritis filosofis. Pandangan al-Farabi mengenai kekuasaan politik berangkat dari pemahaman mengenai manusia. Manusia membutuhkan manusia lain untuk mencapai kesempurnaan.

“Setiap individu membutuhkan individu lain untuk memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Sebab ia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.”¹⁷³

Pemahaman di atas menjelaskan bahwa relasi saling membutuhkan manusia terhadap manusia menyebabkan terjadinya ketergantungan satu sama lain untuk bertahan hidup. Manusia pada kehidupannya memiliki masalah bersifat mendasar yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dirinya (individu) dan hubungan sosial (kelompok). Manusia selalu mencari jawaban atau solusi atas masalah yang manusia hadapi baik itu urusannya sendiri atau kelompok, hal ini menjadi kebutuhan manusia. Manusia saling membutuhkan sehingga mereka berkerja sama untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia akan hubungan sosial, maka manusia membentuk negara. Jadi negara dapat terbentuk atas dasar watak alamiah manusia. Negara sebagai wadah manusia dalam melakukan hubungan sosial.

¹⁷³Imam Ma'rif, Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib dan Relevansinya dalam Nilai-nilai Pendidikan Islam, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 36.

Bagi al-Farabi, tujuan negara adalah kebahagiaan. manusia bernegara karena menginginkan kebahagiaan sebagai tujuan akhir hidupnya. Kebahagiaan yang dimaksudkan al-Farabi bukan apa yang disebut kenikmatan. Kenikmatan bersifat materi seperti harta, tahta, makanan itu tidak sejati atau hanya sementara. Kebahagiaan yang dimaksud al-Farabi bersifat non-materi seperti pengetahuan dan perbuatan baik. Sehingga manusia dalam bernegara saling bekerjasama untuk mencapai kebahagiaan yang sejati.¹⁷⁴

Jika kita lihat pada penjelasan di bab-bab sebelumnya, kita sama-sama bisa melihat bahwa pada teori kuasa Machiavelli tidak sesuai dengan tujuan negara yang di paparkan oleh al-Farabi. Dalam teori kuasa Machiavelli menegaskan bahwa tujuan dari kekuasaan itu adalah kejayaan dari pemimpin itu sendiri. Sehingga pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya tidak berpegang teguh pada tujuan untuk kebahagiaan bersama.

Al-Farabi dalam kitab Tahsil al-Sa'adah, menyatakan bahwa manusia setidaknya memiliki sejumlah keutamaan untuk mencapai kebahagiaan sejati yaitu, keutamaan teoritis, keutamaan berfikir, keutamaan moral (akhlak) dan keutamaan berkreasi melalui perbuatan-perbuatan praktis. Keutamaan teoritis dan berfikir (rasional) akan mengantarkan manusia pada aql fa'al, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Namun, agar sampai pada aql fa'al, daya-daya pada jiwa manusia harus optimal. Daya-daya dapat optimal bukan hanya tentang pengetahuan dan berfikir, juga dibutuhkan moral dalam bertindak. Karena tindakan yang dilakukan manusia menentukan kualitas jiwa manusia. Dengan ini melakukan tindakan baik berarti juga menjaga kualitas jiwa.¹⁷⁵

Al-Farabi memiliki pandangan bahwa yang lebih berpengaruh pada apapun yang dilakukan oleh manusia adalah jiwa. Jiwa sebagai suatu penggerak dan penentu bagaimana manusia bertindak, memahami suatu kejadian dan menjelaskan

suatu persoalan dapat mengalami kondisi dimana ia merasa tidak Bahagia karena jiwa manusia berkaitan langsung dengan kebahagiaan dan yang merasakan kebahagiaan adalah jiwa dan kesempurnaan pada manusia berada pada kesempurnaan jiwanya. Selain itu, kebutuhan mendasar lainnya adalah bagaimana mengenal penciptanya.¹⁷⁶

Sedangkan Machiavelli memahami bahwa manusia pada dasarnya tidak baik. Manusia memiliki beberapa sifat tidak baik sehingga manusia terlihat buas dapat mengancam manusia lainnya. Untuk melindungi dirinya maka manusia khususnya dalam hal ini seorang pemimpin dalam pemikiran Machiavelli harus ditakuti oleh masyarakat dan pemimpin lainnya. Karena jika pemimpin itu baik, ada potensi diremehkan dan dapat dikhianati oleh masyarakat atau bahkan tentara perangnya sendiri.

Hubungan antara kekuasaan dan segala yang berkaitan dengan moral dan agama tidak diperhatikan oleh Machiavelli. Sudah banyak dibahas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya bahwa Machiavelli salah satu tokoh Renaissance, yang memisahkan antara politik dengan agama dan moral. Untuk itu terkait tindakan pemimpin dalam berkuasa tidak melihat aspek moral. Hal ini berimplikasi aturan dan hukum yang diterapkan di suatu negara serta keputusan seorang pemimpin tidak melibatkan aspek moralitas.¹⁷⁷

Moral bagi al-Farabi dapat membantu manusia dalam menentukan pilihan yang baik atau buruk. Sehingga keutamaan moral (akhlak) akan mengarahkan manusia dalam bertindak dan mengambil keputusan yang mengacu kepada kepentingan bersama.¹⁷⁸ Peneliti menemukan bahwa pemikiran al-Farabi ini meniscayakan dalam kepemimpinan seorang pemimpin apabila menggunakan pertimbangan moral, maka akan mengacu pada kepentingan bersama pula. Apabila pemimpin memiliki

¹⁷⁶Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, *‘‘Arâ Ahl Al-Madînah Al-Fadhîlah wa Madhatuha*, hal. 61

keutamaan berfikir dan moral, maka dalam mengambil sebuah keputusan akan dipikirkan secara mendalam dalam dalam kuat mempertimbangkan potensi baik dan buruk sebagai resiko dari tindakan yang dilakukan oleh pemimpin.

Al-Farabi menjelaskan agar semua komunitas manusia mendapatkan kebahagiaan yang sejati, pemimpin harus menggunakan dua metode yaitu pengajaran dan pembentukan karakter.¹⁷⁹ Pengajaran dilakukan pemimpin secara persuasif untuk memperkenalkan kebaikan teoritis dengan harapan masyarakat akan memahami teori-teori dan mengamalkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan teoritis normatif. Sedangkan pembentukan karakter adalah metode memperkenalkan kebajikan moral dan seni praktis yang dilakukan dengan cara membiasakan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berasal dari keadaan praktis karakter, yaitu dengan cara membangkitkan tekad pada diri mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan mereka pada kebahagiaan sejati, baik secara persuasif maupun paksaan.¹⁸⁰

Al-Farabi menyatakan bahwa pemimpin negara itu seperti kepala keluarga dalam rumah tangga. Pemimpin negara sebagai pengajar dan pembentuk karakter bagi anggota keluarganya. Ia harus mengajari dan membentuk karakter semua anggota keluarga itu dari yang kecil sampai yang sudah beranjak dewasa. Sebagian dari mereka membutuhkan cara pengajaran yang lemah lembut dan penuh pengertian, Sebagian lagi harus dengan cara kekerasan dan paksaan. Begitupun dengan masyarakat dalam sebuah negara, sebagian cukup dengan cara pengajaran dan membentuk karakter dengan lemah lembut, tetapi Sebagian lainnya harus dengan paksaan. Hal ini boleh dilakukann untuk mengarahkan manusia pada kebahagiaan yang sejati.¹⁸¹

Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia setiap manusia memiliki kemampuan dan kualitas jiwa yang berbeda-beda.

Sehingga membutuhkan pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas masing-masing dan Kerjasama yang teratur. Prinsip pembagian kerja ini mengacu pada prinsip keadilan. Untuk menjaga ketentraman manusia maka dibutuhkan pemimpin. Al-Farabi mengibaratkan seperti tubuh manusia yang di dalamnya ada organ utama dan organ pembantu utama. Pemimpin negara sebagai organ utama yaitu jantung dan masyarakat terbagi menjadi beberapa organ pembantu utama sesuai dengan kapasitasnya.¹⁸²

Sedangkan bagi Machiavelli pemimpin negara harus ditakuti seperti singa dan licik seperti rubah. Pemimpin harus ditakuti seperti singa maksudnya bahwa seorang pemimpin akan dihargai dan diakui kepemimpinannya apabila pemimpin disegani dan ditakuti oleh masyarakat dan pemimpin lainnya. Bagi Machiavelli pemimpin juga harus licik seperti rubah. Maksudnya adalah pemimpin harus memiliki strategi dan pemikiran yang tajam untuk membaca ancaman yang akan mengancam kekuasaannya. Seperti yang sudah banyak disebutkan bahwa pemimpin bagi Machiavelli ini semata-mata memikirkan kejayaan dirinya sendiri, bukan seperti pemimpin ideal al-Farabi yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakatnya.

Bagi al-Farabi, manusia kebanyakan berlomba-lomba melakukan segala cara merebut posisi kepemimpinan untuk popularitas dan keuntungan dirinya sendiri. Sementara dalam islam mewajibkan para pemimpin untuk membina para pemimpin di bawahnya dan mengatur kehidupan umat manusia menuju keridhoan Allah Swt. Oleh karena itu pemimpin utama harus memiliki beberapa syarat sehingga ia dapat menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik. Terdapat pemimpin yang merujuk pada personalitas, posisi, dan kemampuan. Kemudian pengikut yang merujuk pada makna kepercayaan, kepatuhan, kritis berpikir. Terakhir situasi yang merujuk pada makna

¹⁸²Moh Asy'ari Muthar, *The Ideal State, Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal, Cet I*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2018), 201

pekerjaan, lingkungan, dan kondisi sosial. Berdasarkan pada tiga fenomena ini, al-farabi membagi masyarakat menjadi tiga yaitu masyarakat awam, masyarakat terdidik, dan masyarakat terpilih. Masyarakat awam ialah masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas dalam pemikiran, pengetahuan, dan bersifat pasif menerima ketentuan dan kebenaran konvensional. Kedua, masyarakat terdidik ialah masyarakat yang memiliki keahlian tertentu pada bidangnya. Ketiga, masyarakat terpilih ialah masyarakat yang mendekati atau memiliki kriteria-kriteria pemimpin utama. Mereka adalah orang yang layak menjadi pemimpin utama karena memiliki kemampuan berpikir yang baik, pengetahuan yang luas, serta (akhlak) yang baik.¹⁸³

Al-Farabi menilai negara bukan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan politik tertentu yang menghalalkan segala cara. Tetapi lebih melihat interaksi sosial dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Untuk mencapai hal itu, perlu adanya kerjasama yang baik antar individu. Dalam proses interaksi manusia dan kerjasama sosial, manusia memiliki kecenderungan tertentu dan kebiasaan yang masih memungkinkan manusia melakukan hal baik dan buruk. Dalam konteks ini, keberadaan pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dan mengetahui hakikat realitas sangatlah penting untuk menampung aspirasi dari pikiran-pikiran yang berbeda di antara masyarakat.¹⁸⁴

Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia setiap manusia memiliki kemampuan berfikir dan kualitas jiwa yang berbeda-beda. Sehingga membutuhkan pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas masing-masing dan Kerjasama yang teratur. Prinsip pembagian kerja ini mengacu pada prinsip keadilan. Untuk menjaga ketentraman manusia maka dibutuhkan pemimpin. Al-Farabi mengibaratkan seperti tubuh manusia yang

¹⁸³ Moh Asy'ari Muthar, *The Ideal State, Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, Cet I, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2018),170

¹⁸⁴ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, hal. 132

di dalamnya ada organ utama dan organ pembantu utama. Pemimpin negara sebagai organ utama yaitu jantung dan masyarakat terbagi menjadi beberapa organ pembantu utama sesuai dengan kapasitasnya.¹⁸⁵ Sebagai organ utama, pemimpin harus sehat secara jasmani maupun rohani. Karena apapun yang terjadi pada pemimpin akan berimbas kepada yang dipimpin.

Al-Farabi menyatakan bahwa manusia yang pantas untuk menjadi pemimpin dalam negara utamanya adalah manusia yang berkualitas tinggi. Baginya manusia berkualitas tinggi dapat menyelenggarakan pemerintahan menuju kebahagiaan. sebab itu, memilih seorang pemimpin bukanlah hal yang sederhana. Karena pemimpin tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tapi juga mempunyai tugas untuk mendidik dan pembentukan karakter masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa al-Farabi memberikan beberapa syarat untuk menjadi pemimpin. Sehingga bagi al-Farabi yang pantas untuk menjadi pemimpin dalam negara utamanya adalah nabi dan filsuf. Farabi mengatakan bahwa filsuf yang sudah mencapai *aql mustafad* dengan 12 kriteria sifat yang harus dimiliki yang mana itu juga ukuran yang bisa dinilai oleh masyarakat. Karena nabi sudah tidak ada, dan setidaknya pemimpin itu setingkat filsuf, maka manusia harus berusaha menjadi manusia yang memiliki kualitas demikian. Kualitas-kualitas akal maupun sifat tersebut sudah dicontohkan dan diajarkan oleh nabi. Segala yang diajarkan dan menjadi gerak gerik nabi adalah jalan hidup yang menjadi bagian dari agama juga. Sehingga, agama memberikan petunjuk bagi manusia untuk mengikuti nabi dan mencapai kualitas-kualitas tersebut. Tingginya kemampuan akal seorang filsuf berbanding lurus dengan pengetahuannya. Semakin tingginya kualitas penggunaan akal, memungkinkan manusia mendapatkan pengetahuan yang kemudian diolah menjadi konsep universal

¹⁸⁵ Moh Asy'ari Muthar, *The Ideal State, Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal, Cet I*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2018), 201

baik itu pada *ma'qul awwali* atau dan *ma'qul tsani falsafi wa mantiqi*.¹⁸⁶

Bagi al-Farabi, syarat-syarat pemimpin ideal tidak akan bisa terpenuhi. Untuk itu Al-Farabi memberi alternatif sebagai gantinya yaitu pemimpin peringkat kedua. Menurutnya, pemimpin peringkat kedua memungkinkan dapat melanjutkan pemimpin utama yang ideal dengan kriteri-kriteria yaitu, bijaksana, mengerti dan mampu melaksanakan undang-undang, memiliki kecerdasan dalam mengambil kesimpulan, mampu memprediksi persoalan-persoalan yang akan terjadi di masa yang akan datang, mampu menasehati orang dan bernadan sehat.¹⁸⁷ Kriteria-kriteria ini harus dimiliki oleh pemimpin, karena bagi al-Farabi diantara manusia tidak menutup kemungkinan memiliki kemampuan yang sama. Akan tetapi yang punya daya imajinasi dan kearifan dalam bertindaklah yang pantas menjadi pemimpin. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan sejati, baik secara individu maupun secara kelompok. Karena kebahagiaan merupakan puncak dari tujuan hidup yang diinginkan oleh setiap manusia. Pemimpin yang dimaksud oleh al-Farabi adalah pemimpin yang dalam tindakannya dapat memberikan manfaat bari dirinya dan orang lain, khususnya masyarakat yang dipimpin. Serta menghantarkan masyarakatnya dalam mencapai kebahagiaan yang sejati.

Berbeda dengan pemikiran al-Farabi, menurut Machiavelli pemimpin harus mendapat dukungan dari rakyat. Karena kalau tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemimpin akan mendapatkan kesulitan. Kadang kala seorang pemimpin baru, dalam upaya mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya dapat melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh masyarakat. Kemudian pemimpin harus mengatur strategi agar masyarakat dapat melupakan kejadian yang tidak ia senangi tersebut kemudian hari. Bagi Machiavelli pemimpin tidak perlu

¹⁸⁶ Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State*, hal. 200

¹⁸⁷ Moh Asy'ari Muthar, *The Ideal State*, Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal, Cet I, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2018), 208.

memiliki sifat baik, tetapi pemimpin harus bersikap seolah-olah ia baik. Untuk itu Machiavelli menyarankan pemimpin keras sekaligus licin. Garang seperti srigala dan cerdik seperti rubah. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa pemimpin yang baik dalam pandangan Machiavelli adalah pemimpin yang cerdas dalam bertindak.¹⁸⁸

Gambaran di atas menjelaskan sedikit kepada kita bahwa teori kekuasaan Machiavelli berpacu pada hal-hal yang material. Tujuan dari kekuasaan yang dibangun Machiavelli adalah kejayaan dari pemimpin itu sendiri. Sehingga cara apapun dapat dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai tujuannya tersebut seperti, kekejaman, perbuatan tidak baik, berdusta dan lain sebagainya. Sedangkan peneliti di sini menghadirkan Kembali pemikiran al-Farabi yang beranggapan bahwa tujuan dari adanya negara adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sejati (non-materi). Sehingga dalam upaya memperoleh kebahagiaan tersebut, manusia harus memiliki kekuatan berfikir dan keutamaan moral (akhlak). Karena kebahagiaan yang sejati berkaitan dengan kesempurnaan jiwa. Tindakan baik dan buruk yang dilakukan manusia berdampak kepada tingkatan jiwa manusia. Jadi, menurut penganalisaan dari relevansi pemikiran yang dibangun oleh Machiavelli tidak mengacu pada tujuan terbangunnya sebuah negara yaitu kebahagiaan bersama.

Dari berbagai perbedaan pemikiran politik Machiavelli dan Al-Farabi yang telah dipaparkan di atas, penulis juga menemukan beberapa persamaan pemikiran politik antara kedua. Pertama, Bagi Machiavelli negara adalah sebuah konsep yang bersifat impersonal, negara bukanlah milik pribadi. Machiavelli tidak melihat negara sebagai suatu yang melekat pada diri seseorang. Entitas negara menjadi entitas publik, dimiliki bersama. Berlainan dengan negara, Machiavelli menekankan segi personalitas pada diri pemimpin negara. Sehingga baginya pemimpin hanya dapat berkuasa apabila pemimpin memahami

¹⁸⁸ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Terjemah oleh Natalia Triaji, , Cet I, (Surabaya: Ecosystem Publishing, 2018), 152.

secara tepat tentang pentingnya keterampilan, bakat dan kekuatan yang ia perlukan dalam memimpin. Pandangan mengenai negara yang dipaparkan Machiavelli ini sejalan dengan yang peneliti pahami terkait pandangan negara yang dipaparkan Al-Farabi. Bagi Al-Farabi negara di bangun oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama, sehingga negara menjadi milik masyarakat bersama.

Kedua, pandangan politik Machiavelli dan Al-Farabi berangkat dari permasalahan politik pada masa mereka hidup. Dengan demikian pemikiran politik mereka timbul atas kejadian yang mereka alami dalam hidup mereka. Timbulnya perbedaan dalam pemikiran politik mereka karena perbedaan masalah dan konflik yang mereka hadapi pada saat itu. Hingga timbul pemikiran yang kontras antar keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman sebelumnya mengenai konsep pemimpin ideal Al-Farabi sebagai relevansi teori kuasa Machiavelli, maka penulis berkesimpulan bahwa;

1. Al-Farabi merupakan seorang pemikir ideal yang mendambakan seorang pemimpin yang memiliki karakter sempurna. Sehingga bagi Al-Farabi yang cocok menjadi pemimpin Al-Farabi adalah manusia yang memiliki karakter utama. Sedangkan Machiavelli merupakan seorang pemikir yang realistis. Machiavelli lebih mengedepankan realitas. Sehingga bagi Machiavelli seorang pemimpin harus mengabaikan pertimbangan moral sepenuhnya dan mengandalkan segala sesuatu pada kekuatan, akal dan mungkin juga kelicikan.
2. Teori kekuasaan Machiavelli berpacu pada hal-hal yang material. Tujuan dari kekuasaan yang dibangun Machiavelli adalah kejayaan dari pemimpin itu sendiri. Sehingga cara apapun dapat dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai tujuannya tersebut seperti, kekejaman, perbuatan tidak baik, berdusta dan lain sebagainya. Sedangkan pemikiran al-Farabi beranggapan bahwa tujuan dari adanya negara adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sejati (non-materi). Sehingga dalam upaya memperoleh kebahagiaan tersebut, manusia harus memiliki kekuatan berfikir dan keutamaan moral (akhlak). Karena kebahagiaan yang sejati berkaitan dengan kesempurnaan jiwa.
3. Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia setiap manusia memiliki kemampuan berfikir dan kualitas jiwa yang berbeda-beda. Sehingga membutuhkan pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas masing-masing dan Kerjasama yang teratur. Prinsip pembagian kerja ini mengacu pada prinsip keadilan. Untuk menjaga ketentraman manusia maka dibutuhkan pemimpin. Al-Farabi mengibaratkan seperti

tubuh manusia yang di dalamnya ada organ utama dan organ pembantu utama. Pemimpin negara sebagai organ utama yaitu jantung dan masyarakat terbagi menjadi beberapa organ pembantu utama sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai organ utama, pemimpin harus sehat secara jasmani maupun rohani. Karena apapun yang terjadi pada pemimpin akan berimbas kepada yang dipimpin. Machiavelli pemimpin harus mendapat dukungan dari rakyat. Karena kalau tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemimpin akan mendapatkan kesulitan. Kadang kala seorang pemimpin baru, dalam upaya mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya dapat melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh masyarakat. Kemudian pemimpin harus mengatur strategi agar masyarakat dapat melupakan kejadian yang tidak ia senangi tersebut kemudian hari. Bagi Machiavelli pemimpin tidak perlu memiliki sifat baik, tetapi pemimpin harus bersikap seolah-olah ia baik. Untuk itu Machiavelli menyarankan pemimpin keras sekaligus licin. Garang seperti srigala dan cerdik seperti rubah. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa pemimpin yang baik dalam pandangan Machiavelli adalah pemimpin yang cerdas dalam bertindak.

4. Dengan adanya perbedaan prinsip-prinsip kepemimpinan antara Machiavelli dan Al-Farabbi, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Machiavelli bertentangan dengan teori kepemimpinan Al-Farabi, karena tidak mengantarkan pada kebahagiaan yang telah di jelaskan dalam al-Madinal al-Fadillah.

B. Saran

Adapun penelitian ini hanya secuil dari pemikiran filsafat politik Machiavelli maupun Al-Farabi, untuk itu saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya agar lebih mengembangkan penelitian ini dengan meneliti pemikiran filsafat politik kedua tokoh secara ontologi. Penelitian ini sudah memaparkan pemikiran kedua tokoh secara ontology dan epistemologi, hanya saja dalam penelitian ini lebih menjelaskan dari segi epistemologi dan kurang dalam segi ontologi

Daftar Pustaka

- Al-Farabi, Abu Nasr, *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah wa Madhatuha*, bab 15 dalam Richard Walzer, *Al-Farabi on The Perfect State*: Oxford, Clarendon Press, 1985.
- Al-Farabi, Abu Nasr, *as-Siyasat al-Madiniyah*, Dar wa Maktabah al-Halal, Versi PDF
- Al-Farabi, Ihsa' Al-Ulum, Libanon: Centre De Development National, 1991.
- Al-Jubouri, I.M.N, *History of Islamic Philoshopy : With View of Greek and Early Histori of Islam*, England : Bright Pen, 2004.
- A. Mustofa, *Filsafat Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Andi, Agus Salim, *Ilmu Negara*, Makassar : Kretakupa Print, 2019.
- Anggito, Albi *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- As, Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Atthahara, Haura, *Perspektif Ideologi dan Kekuasaan dalam Pemikiran Machiabelli: Studi Khusus Pemilihan Presiden 2019*, Vol. 4 No. 1, Bandung: Jurnal, 2020.
- Bagir, Haidar, *Buku Saku Filsafat Islam*, Bandung : Mizan, 2006.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Basroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Black, Anthony, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: serambi, 2001.
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Budiyono, Kabul, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Butterworth, Charles E, *Al-Farabi, The Political Writings: Selected Aphorism and other text*, Ithaca and London: Cornel University Press, 2001.
- Daudy, Ahmad, *Kuliah Filsafat Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.
- Davidson, Herbert A, *Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect*, New York : Oxford University Press, 1992.

- Dedi, Suryadi, *Pengantar Filsafat Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009.
- Dr. Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Cet. 1, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
- El-Affendi, Abdel Wahab, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Frankena, William K, *Ethics*, New Delhi: Prentice-Hall, 1982.
- Gie, The Liang, *Etika Administrasi Pemerintah*, Jakarta: Karunia Jakarta Universitas terbuka, 1993.
- Habib, Syarifah, *Akhlaq dan Etika dalam Islam*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. I No. 4, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015
- Hanani, Silfia, *Dialog Filsafat Dengan Teologi : Tuhan dan Alam dalam Perbincangan Filosof Ibnu Sina dan Teolog Al-Ghazali*, Bandung : Tafakur, 2004
- Heris, Hermawan, *Filsafat Islam*, Bandung : CV Insan Mandiri, 2011.
- Hobbes, Thomas, of Malmesbury, *Leviathan*, London: the Green Dragon in St. Pauls Church-yard, 1651.
- Humaidi, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi : Pendasaran Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, dan Agama*.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein N, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Khaldun, Abdurrahman Muhammad Ibn, *Muqaddimah*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Kartanegara, Mulyadi, *Menembus Batas Waktu Panorama Filsafat Islam*, Jakarta: Mizan, 2002.
- K. Bertens, *Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Kumoroto, Wahyu, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lessnoff, Michael, *The Social Contract: Issues in Political Theory*, London: Macmillan, 1986.
- Luth, Thohir, *Diskursus Bernegara Dalam Islam Dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan*, Malang : UB Press, 2018.

- Machiaveli, Niccolo, *Sang Penguasa*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2002.
- Machiavelli, Niccolo, *The Prince*, Terjemah oleh Natalia Triaji, , Cet I, Ecosystem Publishing: Surabaya, 2018.
- Machiavelli, Niccolo, *The Prince*, Translated and ed. Thomas G Bergin, United State of America: F.S Crofts and Co., INC, 1947.
- Mahasinah, Muhammad Husain, *Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Putaka Al-Kautsar, 2016.
- Mahmuda, Konsep Negara Ideal atau Utama (Al-Madinnah Al-Fadillah) Al-Farabi) UIN Medan, Vol 2, 2017.
- Miriam, Prof. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- M. Sastrapratedja dan Franz M. Parera. *Sang Penguasa, Surat-surat Kenegaraan untuk Umat Lorenzo De Medici*. Jakarta: Gramedia.
- Mutahhari, Murtadha, *Imamah dan Khilafah*, Jakarta : CV. Firdaus, 1991
- Nasr, Seyyed Hossein, *Three Muslim Sages*, New York: Caravan, 1997.
- Nasution, Metode Research, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Nisbet, Robert, *The Social Philosopher, Community and Conflict in Western Thought*, New York : Washington Square Press, 1986.
- Palmer, Donald, *Looking at Philosophy*, New York: Me Graw Hill, 2001.
- Petrus, Simon, *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius 2004.
- Pramana, Pudja, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Rahmana Putra, Ario, *Ideologi Fasisme (Pemikiran Adolf Hitler atas Konsep Fasisme di Jerman)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014
- Rumijati, Aniek, kekuasaan dan moralitas, sebuah pengantar kearah pemahaman organisasi, jurnal ilmiah bestari, no.32.Th.XIV. 2001.
- Sari, Sri Hartuti Puspita, Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli Tentang Kekuasaan-Tujuan Negara, Jurnal Hukum, No 18.Vol 08. 2001.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.

- Schmandt, Hendry J, *A History of Political Philosophy*, (America: The Bruce Publishing Company, 1960), terj. *Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sina, Ibnu, Al-Kiya, diambil dari terjemah Gutas, Avicenna, 64. Dikutip dari Yahya Michot, *Al-Farabi and His Influence on The Early Avicenna : The Evidence From The Kitabal-Mabda' wal Ma'ad*, Ankara, Elis Yayinlari, 2005
- Soehino, *Ilmu Politik*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Solikhin, Muhammad, *Filsafat Dan Metafisika Dalam Islam : Sebuah Pengalaman Mistik dan Perjalanan Aliran Manunggaling Kawula Gusti*, Yogyakarta : Narasi, 2008
- Sudjatmoko, *7 Tokoh Filsafat Dunia*, Sukoharjo : Penembahan Senopati, 2015
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Surjaya, Martin, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik : Dari Praasejarah Hingga Abad Ke-4 M*, Tangerang : CV Marjin Kiri, 2016.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Suseno, Franz Magnes, *Kekuasaan dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Suwatno, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara, 2019
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideology, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ketiga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Tjaya, Thomas Hidy, *Humanisme dan Skolastik Sebuah Debat*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Winarni, Retno, *Sejarah Pemikiran Modern*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2014.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam : Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Bandung : Mizan, 2002.

- Yazdi, Mizbah, Meniru Tuhan, diterjemahkan oleh Ammar Fauzi Heriyadi, Jakarta:Al-Huda, 2006.
- Zainudin, A. Rahman, Kekuasaan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.